

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial



Oleh

Agung Baskoro SB

NIM 13417141080

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2016

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi Dengan Judul

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA (UNY)**

Disusun Oleh :

Agung Baskoro SB

NIM. 13417141080

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 30 September 2016

Untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

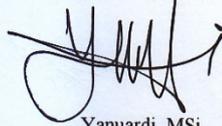
Jurusan Ilmu Administasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,



Yanuardi, MSi

NIP. 19750109 200801 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Agung Baskoro SB

NIM : 13417141080

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul : Efektivitas Program Bidikmisi di Univeristas Negeri
Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti kaidah tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Penulis bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Agung Baskoro SB

NIM. 13417141080

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA" yang disusun oleh Agung Baskoro SB, NIM 13417141080 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada tanggal 11 Oktober 2016 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Argo Pambudi, M.Si	Ketua Penguji		19/10-2016
Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si	Penguji Utama		17/10 2016
Yanuardi, M.Si	Sekretaris Penguji		19/10 2016

Yogyakarta, 24 Oktober 2016
Fakultas Ilmu Sosial
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali- kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Q.S Ar-Ra'du (13): 11)

Dengan menghormati kita belajar
menghargai, dengan menghargai kita
belajar mensyukuri, dengan mensyukuri
kita belajar mengasihi.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahuwata'alla,
saya persembahkan skripsi ini kepada

Kedua orangtuaku

Bapak Gunadi SB dan Ibu Jusmawati HS atas
kepercayaan, kesabaran, ketulusan dan cinta

kasihnya

dan

Almamaterku

Universitas Negeri Yogyakarta

atas kesempatan dan ilmu yang diberikan

EFEKTIVITAS PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Oleh
Agung Baskoro SB
13417141080

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program bidikmisi dan faktor penghambat penyelenggaraan program bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian dengan dibantu pedoman wawancara dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan program bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta merupakan wujud nyata partisipasi UNY sebagai pelaksana kebijakan dalam mendukung komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Efektivitas program bidikmisi di UNY dilihat berdasarkan ketercapaian tujuan bidikmisi yaitu (1) Pemerataan akses pendidikan, (2) Lulus tepat waktu, (3) Meningkatkan prestasi dan Semangat berkompetisi, dan (4) SDM Berkualitas yang sudah dinyatakan efektif. Faktor penghambat yang muncul adalah Komitmen dan keseriusan mahasiswa bidikmisi dalam menjalankan kewajibannya, Kurangnya koordinasi antara pengelola bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi serta sasaran program, Keterlamabatan pencairan dana bidikmisi, Program S1 Kependidikan belum dialokasikan anggarannya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kata kunci: efektivitas, program, beasiswa, bidikmisi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT semata. Sehingga atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Lantunan doa shalawat beserta salam sebagai ucapan terima kasih atas jasanya semoga selalu tertujukan kepada sang revolusioner sejati bagi peradaban manusia, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Pendidikan tinggi merupakan wadah untuk lebih meningkatkan minat dan bakat setiap individu agar mampu bersaing di era global. Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus mampu memberikan sarana dan prasarana dalam mengakses jenjang pendidikan tinggi serta mengatasi keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Faktor ekonomi merupakan hambatan utama masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Oleh sebab itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Pemberian dana pengembangan pendidikan bidikmisi bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non akademiknya. Universitas mengemban tanggungjawab sebagai penyelenggara program bidikmisi. Oleh sebab itu, keberhasilan program bidikmisi tidak terlepas dari keseriusan penyelenggara program bidikmisi. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta(UNY).

Penulisan skripsi ini terwujud berkat pengarahan, bimbingan, dorongan, dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd,M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atas izin dan kesempatan yang diberikan untuk penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi.
3. Bapak Argo Pambudi, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus Ketua penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Sugi Rahayu, M.Pd,M.Si., sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Penguji Utama yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, arahan, dan profesional selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Yanuardi, M. Si, sebagai dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, pengarahan, meluangkan waktu, dan profesional selama penyusunan skripsi.
6. Segenap pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menimba ilmu.
7. Keluarga ku tercinta, Bapak Gunadi SB dan Ibu Jusmawati HS yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang yang berlimpah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dan abangku, Bang Ara yang selalu mengingatkan untuk shalat hajat dan Kak Bunga yang selalu menjadi teman curhat serta si gadis kecil Ranti yang mendorong

untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

8. Bapak Sukirjo, M.Pd, Bapak Suwarjo M.Si, dan Ibu Terry Irenwati M.Hum selaku informan kunci yang telah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program bidikmisi di UNY
9. Teman-teman Alayers, Prima, Joko, Kak Cham, Umi, Mika, Mba Ria, Mas Jo, Mas Hill, Kiki, Arti, Gusti, Lili, Taufik yang telah mengisi waktu ku selama di Jogja dan menemani dikala sedih maupun senang.
10. Mba Panda sebagai personal advisor yang telah bersabar membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
11. Rio Irmah sahabat terbaik sekaligus kakak dan motivator yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
12. Keluarga Pelem, Mas inung, Mas wahyu, Mas Banto, Mas Dwe, Mas Soleh, Mas Jajo, Mas Gito, Mba Anis dan Mba Rere yang telah menjadi keluarga terbaik selama aku berada di Jogja.
13. Sahabat kampusku, Pudli, Emil. Laurenz, Kitty yang telah memberikan semangat tanpa lelah hingga tugas akhir skripsi ini selesai.
14. Wolfriend dan seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNY Angkatan 2012 atas kebersamaannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Oktober 2016

Penulis,

Agung Baskoro SB

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teoritik.....	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Kebijakan Sosial.....	13
3. Kebijakan Pendidikan.....	14
4. Kebijakan Pendidikan Tinggi	16
B. Efektivitas Kebijakan.....	17
1. Pengertian Efektivitas Kebijakan.....	17
2. Indikator Efektivitas Kebijakan	18
C. Bidikmisi	20
D. Mahasiswa Miskin.....	22
E. Penelitian Relevan	24

F. Kerangka Pikir	26
G. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Instrumen Penelitian	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Deskripsi Umum Penelitian.....	42
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
b. Gambaran Umum Program Bidikmisi.....	44
c. Gambaran Umum BAKI UNY.....	59
2. Deskripsi Hasil Data Penelitian.....	61
a. Pemerataan Akses Pendidikan.....	61
b. Meningkatkan Prestasi & Semangat Berkompetisi.....	66
c. Lulus Tepat Waktu.....	70
d. Sumber Daya Manusia Berkualitas.....	76
3. Faktor Penghambat Penyelenggaran Program Bidikmisi.....	81
B. PEMBAHASAN.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi	102
C. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2012.....	79
2. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Angkatan 2011.....	67
3. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Angkatan 2011.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	29
2. Struktur Organisasi UNY.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Dokumentasi
4. Pedoman Bidikmisi 2015
5. Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Yogyakarta
Periode Sampai dengan Semester Gasal 2015/2016
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi merupakan bagian terpenting untuk menghasilkan sumber daya yang kompetitif dan professional pada bidangnya agar mampu bersaing secara global sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi bahwa tujuan pendidikan tinggi ialah "...untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa". Perhatian pemerintah pada kualitas jenjang pendidikan tinggi akan membawa pengaruh besar dalam meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan sebuah bangsa. Dengan kata lain pendidikan merupakan investasi bangsa untuk menjadikan sebuah bangsa yang terdepan dan maju.

Namun, faktanya tak sejalan dengan apa yang diharapkan. Pendidikan tinggi berhadapan dengan berbagai macam problematika. Salah satu problematika adalah pemerataan terhadap akses ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29,4% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian, masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu

secara ekonomi (Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015).

Keadaan finansial menjadi sumber utama dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan pendidikan tinggi sesuatu yang mahal untuk dapat diakses bagi mereka yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi. Besarnya biaya kuliah yang harus dibebankan pada setiap mahasiswa membuat mereka yang tidak mampu harus rela menggantungkan impiannya untuk dapat merasakan bangku perkuliahan. Jika pendidikan adalah sesuatu yang mahal serta sulit diakses lantas bagaimana negara mampu mewujudkan kesejahteraan sosial?

Menghadapi kondisi yang telah dipaparkan diatas, pemerintah sebagai aktor dalam pembuat kebijakan dan penanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang baik telah berupaya untuk mengentaskan problematika yang terjadi pada dunia pendidikan dengan membuat berbagai kebijakan seperti pemeratan terhadap pendidikan nasional. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan jaminan mutu pendidikan dan bantuan dana dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan tinggi. Bantuan dana tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial untuk mengentaskan masalah-masalah sosial terkhusus pada akses pendidikan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti).

Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan, berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi, bidikmisi berfokus kepada yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi (bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id 11/01/2016 diakses pada 26 Januari 2016: 19.30 WIB). Seperti yang juga diisyaratkan pada Pasal 76 UU RI No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Penyelenggaraan program beasiswa bidikmisi harus berdasarkan prinsip 3T (tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu) agar kualitas pelayanan dapat

dirasakan oleh penerima bidikmisi sehingga tujuan dari penyelenggaraan beasiswa bidikmisi juga dapat tercapai. Selain itu mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi akan dibebaskan dari biaya pendidikan, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, 6 (enam) semester untuk program Diploma III, serta Akademi Komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II, dan 2(dua) semester untuk program Diploma I. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi juga berhak mendapatkan bantuan dana pendidikan senilai Rp 6 juta persemester dengan rincian untuk memenuhi biaya pendidikan senilai Rp 2,4 juta dan biaya hidup sebesar Rp 3,6 juta.

Namun dibalik fasilitas bantuan dana yang diberikan program bidikmisi, fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan program bidikmisi. Seperti yang dimuat dalam sebuah surat kabar online, Sebanyak 329 mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Universitas Sebelas Maret (UNS) gagal lulus tepat waktu. Wakil Rektor III UNS Darsono mengatakan mahasiswa yang molor masa studinya ini merupakan mahasiswa dari angkatan 2010 berjumlah 73 mahasiswa dan angkatan 2011 berjumlah 371 mahasiswa. Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi mahasiswa bidikmisi cukup kompleks (www.republika.co.id 06/08/2015 diakses pada tanggal 26 Januari 2016: 19.45 WIB)

Sejalan dengan hal tersebut masalah yang terekait dengan bidikmisi lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan bidikmisi yang menyebabkan timbulnya potensi kecurangan. Sebagaimana yang dimuat dalam salah satu media

online, selama ini Universitas Jendral Soedirman hanya mengandalkan data yang diberikan oleh mahasiswa calon penerima Bidikmisi. Idealnya untuk menghindari kecurangan dalam proses penyelenggaraan bidikmisi harus dilaksanakan survey lapangan menyeluruh terlebih dahulu agar data yang diberikan pelamar benar-benar valid. Sehingga bidikmisi dapat dikatakan tepat sasaran (www.beritaunsoed.com 09/10/2015 diakses pada 29 januari 2016: 20.40 WIB)

Problematika bidikmisi tidak hanya sampai disitu, pencairan dana dan alokasi dana bidikmisi tak luput dari masalah. Dikutip dalam sebuah surat kabar online bahwa terjadi keterlambatan pencairan dana bidikmisi. Hal ini dirasakan oleh mahasiswa Unsoed, Banyak dampak lain dari keterlambatan dana Bidikmisi ini, perlengkapan atau peralatan penunjang akademik mahasiswa tidak dapat terpenuhi. Tidak adanya penunjang akademik mahasiswa berdampak pula pada konsentrasi belajarnya. Bukan hanya keterlambatan dana Bidikmisi saja yang meresahkan, ada pula mahasiswa yang sudah menerima dana bidikmisi tetapi dana tersebut berkurang karena ada penarikan uang yang tidak jelas dari pihak universitas yang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal ini dirasakan oleh mahasiswa Bidikmisi tahun angkatan 2010 (www.kompasiana.com 15/12/2014 diakses pada 29 Januari 2016: 21.15 WIB).

Permasalahan yang dihadapi beberapa universitas diatas mungkin juga dialami universitas lain termasuk Univeristas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan awal di UNY ditemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan program bidikmisi antara lain, adanya sejumlah mahasiswa

penerima bidikmisi yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu hal ini dibuktikan berdasarkan hasil laporan tim pengelola bidikmisi UNY. Selain itu terdapat temuan adanya mahasiswa penerima bidikmisi yang diduga tidak tepat sasaran dan mahasiswa penerima bidikmisi yang mengalami kemunduran dalam prestasi akademiknya. Beberapa permasalahan tersebut tentunya dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan program bidikmisi di UNY.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan program bidikmisi. Dengan memilih Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lokasi dalam penelitian ini. Karena UNY merupakan salah satu PTN yang menyelenggarakan program bidikmisi. Peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan program bidikmisi di UNY. Apakah sesuai dengan tujuan dari program bidikmisi serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program bidikmisi.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih ada mahasiswa bidikmisi tidak mampu menyelesaikan masa studinya tepat waktu sesuai ketentuan bidikmisi.
2. Lemahnya pengawasan bidikmisi mengakibatkan timbulnya potensi kecurangan penyelenggaraan program bidikmisi.
3. Keterlambatan pencairan dana bidikmisi.
4. Adanya mahasiswa penerima bidikmisi yang diduga tidak tepat sasaran.
5. Terdapat sejumlah mahasiswa penerima bidikmisi yang mengalami kemunduran dalam prestasi akademik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada pembahasan “Efektivitas Program Bidikmisi di UNY”. Peneliti akan menilai keefektifitasan program bidikmisi berdasarkan ketercapaian tujuan dari program bidikmisi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan program bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Mengetahui efektivitas program bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta
2. Mengetahui faktor penghambat penyelenggaraan program bidikmisi di UNY

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mata kuliah yang di dalamnya membahas tentang proses perumusan kebijakan serta sumber daya manusia, seperti mata kuliah: Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai alat bantu peneliti untuk menyampaikan kepada khalayak bagaimana Efektivitas Program Bidikmisi Di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk menambah wawasan peneliti karena ketertarikan peneliti terhadap kajian fenomena yang menjadi *hot issue* saat ini serta sebagai salah satu tugas yang peneliti ajukan kepada Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar kebijakan pendidikan tinggi yang telah diterapkan saat ini dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya informasi mengenai bantuan dana pendidikan pada akses pendidikan tinggi. Agar masyarakat dalam kategori tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Kebijakan Publik

Sebagai salah satu cabang ilmu multidisipliner, kebijakan publik mencakup beberapa cabang ilmu lain, seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi. Bahkan ilmu psikologi pun masuk dalam bidang kajian kebijakan publik. Kebijakan publik cakupannya sangat luas, dari kebijakan yang bersifat nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Definisi dari kebijakan publik sangatlah banyak, tergantung dari sudut pandang mana kebijakan publik tersebut diartikan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) Kebijakan Publik tersebut dilakukan oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Subarsono, 2005: 2).

Lebih lanjut, Thomas R. Dye menjelaskan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan

bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Pernyataan ini diungkapkan pula oleh James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Subarsono, 2005: 2).

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. David Easton dalam Leo Agustino (2008: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the authoritative allocation of value for the whole society.*"

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Pemerintah merupakan penguasa dalam sistem politik dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah yang melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu

masalah tertentu di mana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (Winarno, 2007: 17). Sementara itu, William N. Dunn (2000:132) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Sedangkan menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky sebagaimana dikutip oleh Suwitri (2008:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan. Definisi diatas memiliki sebuah kesamaan terkait kebijakan publik, yaitu kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan publik.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam

ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Makna “kebijakan” pada kata “kebijakan sosial” adalah “kebijakan publik”, sedangkan makna “sosial” menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yakni bidang kesejahteraan (Edi Suharto, 2011:3).

Hill dalam Soetomo (2010:213) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya.

Sejalan dengan hal tersebut Spicker dalam Miftachul Huda (2009:85) juga mendefinisikan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pandangan dari beberapa para ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial merupakan keputusan beserta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat agar kesejahteraan sosial terwujud sehingga setiap lapisan masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang baik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dapat berupa jaminan mutu dan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan serta perbaikan infrastruktur dan bantuan sosial lainnya.

3. Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut sebagai perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108).

Kebijakan pendidikan menurut Riant Nugroho (2008:37) adalah sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus selaras dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang

pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Arif Rohman (2009:108), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pada berbagai pendapat mengenai kebijakan pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, kebijakan pendidikan menjadi satu faktor yang paling penting sebab untuk mencapai kesejahteraan sosial hal pertama yang harus diperbaiki adalah kualitas individu yang tidak lain hanya dapat dicapai dengan peningkatan mutu pendidikan.

4. Kebijakan Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi berdasarkan UU No.12 tahun 2012 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi sendiri memiliki peran yang besar dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, IPTEK, sosial dan budaya, perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Kebijakan pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 sampai dengan Pasal 25 memiliki peran yang cukup penting bagi perguruan tinggi. Peran-peran tersebut yaitu bahwa kebijakan-kebijakan itu mengatur tentang tata cara pelaksanaan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan itu cukup membantu perguruan tinggi, terutama dalam memberi perlindungan hukum bagi pelaksanaan sistem pendidikan perguruan tinggi.

Suatu perguruan tinggi selalu bercirikan suatu organisasi profesional, dimana hasil dan dampak yang tersalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. Hal tersebut memerlukan adanya suasana kerja

yang berbeda dari organisasi yang bergerak di bidang manufaktur, di mana kualitas kerja sangat ditentukan oleh ketepatan melaksanakan prosedur, yang menyangkut cara, urutan, dan waktu. Penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi kerja menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas suatu organisasi profesional lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat dijadikan salah satu alasan kuat agar perguruan tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi merupakan serangkaian keputusan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memeberikan jaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi serta untuk mengentaskan masalah pada dunia pendidikan tinggi. Sehingga diharapkan melalui jenjang pendidikan tinggi dapat melahirkan generasi yang komeptitif dan mampu bersaing secara global.

B. Efektivitas Kebijakan

1. Pengertian Efektifitas Kebijakan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang memiliki makna berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan Istiana Hermawati, dkk (2011:24) menyatakan bahwa suatu program dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan berdampak secara positif bagi sasaran program.

Edi Suharto (2011:42) juga mengungkapkan pendapat yang serupa bahwa efektivitas kebijakan/program sosial merupakan suatu keadaan dimana hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. Sehingga dapat diidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, apakah dampak yang ditimbulkan program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan apakah program tersebut dapat mencapai tujuannya.

Dari beberapa definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan merupakan pencapaian keberhasilan sebuah program/kebijakan yang telah disusun atau direncanakan oleh pemerintah yang berlandaskan tujuan untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Peneliti dalam hal ini mengkaitkan efektivitas sebagai pencapaian hasil dan tujuan kebijakan program bidikmisi dalam meningkatkan prestasi mahasiswa di UNY. Sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program bidikmisi dan manfaatnya bagi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi.

2. Indikator Efektivitas Kebijakan

Indikator efektivitas kebijakan merupakan sebuah tolok ukur untuk mengetahui program tersebut dapat dikatakan efektif/berhasil atau tidak. Sementara James L. Gibson yang dikutip oleh Kurniawan (2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik.

Selanjutnya Earl Babbe (dalam Istiana Hermawati, dkk, 2011:25)

menyatakan, bahwa efektivitas suatu program sosial dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi
- 2) Organisasinya bergerak sesuai dengan kebutuhan nyata menurut arahan program
- 3) Masyarakat dapat menikmati hasil program.

Dari beberapa defenisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan

bahwa indikator efektivitas implementasi kebijakan merupakan pencapaian keberhasilan sebuah program kebijakan yang telah disusun atau direncanakan oleh pemerintah yang berlandaskan tujuan untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Kebijakan tersebut dapat diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dari program yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka Peneliti dalam hal ini mengkaitkan efektivitas sebagai pencapaian hasil dan tujuan kebijakan program bidikmisi dalam meningkatkan prestasi mahasiswa di UNY dengan menggunakan indikator efektivitas kebijakan Dunn, Karena Program Bidikmisi merupakan suatu program sosial yang diharapkan mampu mengentaskan keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi karena tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan dalam bidang akademik. Sehingga perlu adanya analisis

efektivitas menurut lima indikator yang telah dijelaskan diatas terkait bagaimana pelaksanaan program bidikmisi dan manfaatnya bagi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi.

3. Bidikmisi

a. Program Bidikmisi

Bidikmisi adalah singkatan dari Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi, dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik dan konsisten semasa sekolah di SMA (kemahasiswaan.uny.ac.id). Seperti yang juga dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 bahwa, Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiapwarga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didikpada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka

yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

b. Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bidikmisi

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015, menyebutkan misi, tujuan, serta sasaran program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Antara lain :

Misi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- 2) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

- 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
- 2) Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;

- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 4) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
- 5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuklain yang sederajat tahun 2014 dan 2015 yang tidak mampu secara ekonomi dan memilikipotensi akademik baik.

c. Monitoring dan Pengawasan Bidikmisi

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 menyebutkan bahwa bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bidikmisi. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu). Sementara Monitoring dalam pengelolaan bidikmisi dilakukan oleh tim pengelola pusat dan tim pengelola perguruan tinggi.

4. Mahasiswa Miskin

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi (Siswoyo, 2007: 121).

Senada dengan hal tersebut, Hartaji (2012: 5) mendefinisikan Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Sementara itu miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan tidak berharta, serba kekurangan dan berpenghasilan sangat rendah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Miskin merupakan seseorang yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dan terdaftar pada sebuah perguruan tinggi namun memiliki keterbatasan finansial.

Terkait dengan program bidikmisi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi merupakan sasaran dari program bidikmisi. Adapun kriteria pelamar beasiswa bidikmisi antara lain :

- a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
- b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
- c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
- d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;

5. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

- a. **Skripsi Oleh Ekky Lukmana Putri (2014) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program KUBE di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sudah dikatakan efektif dilaksanakan pada kelompok yang masih mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Dilihat dari segi ketepatan kebijakan, hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian tujuan kebijakan terutama dalam memandirikan masyarakat miskin secara

aspek sosial dan ekonomi. Relevansi penelitian terlihat terlihat pada metode dan permasalahan yang diangkat sehingga penelitian tersebut relevan untuk digunakan sebagai acuan teori dalam menganalisis data penelitian. Selain itu Program KUBE juga merupakan program sosial yang berupa dana bantuan dari pemerintah seperti juga dengan bidikmisi yang merupakan program sosial dengan bantuan dana dari pemerintah.

- b. Skripsi oleh Angga Sanjaya (2015) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Revitalisasi Lada Putih Di Provinsi Bangka Belitung”.** Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program revitalisasi lada putih dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program revitalisasi lada putih di Provinsi Bangka Belitung. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program revitalisasi lada putih di Provinsi Bangka Belitung belum efektif. Hal tersebut dikarenakan hasil implementasi belum mampu mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan. Hambatan-hambatan dalam mencapai efektivitas pelaksanaan program revitalisasi lada putih di Provinsi Bangka Belitung, yaitu: 1) faktor internal; master plan program revitalisasi lada belum jelas, persoalan lada belum

sepenuhnya menjadi agenda penting oleh para stakeholders kebijakan, koordinasi antar lembaga masih belum berjalan dengan baik, adanya diversifikasi komoditi lain, 2) faktor eksternal; belum optimalnya dukungan dari pihak luar pemerintah dalam menyukseskan upaya revitalisasi lada di Bangka Belitung. Relevansi penelitian terlihat terlihat pada metode dan permasalahan yang diangkat sehingga penelitian tersebut relevan untuk digunakan sebagai acuan teori dalam menganalisis data penelitian.

6. Kerangka Berpikir

Pendidikan tinggi adalah bagian terpenting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dan professional pada bidangnya sehingga mampu bersaing secara global. Pendidikan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun terdapat beberapa problematika dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah keterbatasan dalam mengakses pendidikan terkhusus dalam hal ini adalah pada jenjang pendidikan tinggi. Seperti yang diketahui tidak semua masyarakat pada usia produktif dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Sebagian besar diantaranya dilatar belakangi karna keterbatasan finansial. Kondisi ekonomi masyarakat yang dikategorikan tidak mampu membuat sebagian masyarakat menyerah pada kemiskinan.

Berangkat dari keterbatasan finansial tersebut Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan

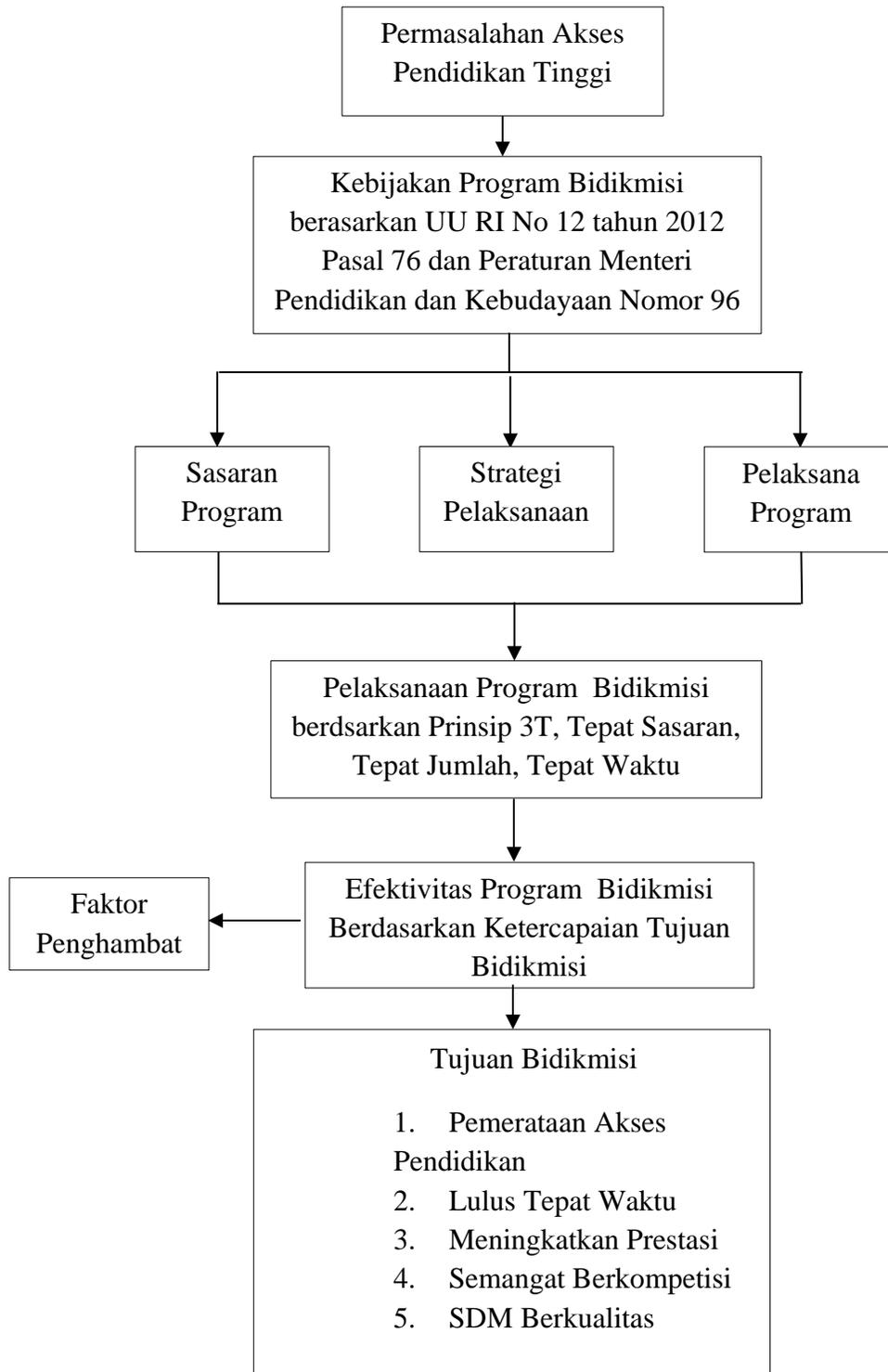
Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di 104 perguruan tinggi negeri. Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009.

Program bantuan dana bidikmisi diharapkan mampu menjawab semua kendala masyarakat dalam mengakses jenjang pendidikan tinggi sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan sosial. Kebijakan mengenai bidikmisi sendiri telah diatur dalam UU RI No.12 tahun 2012 Pasal 76 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96. Pelaksanaan program bidikmisi juga berdasarkan prinsip 3T yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat target. Tujuannya agar pelaksanaan program bidikmisi dapat berjalan dengan baik.

Mahasiswa sebagai peserta didik yang menerima bantuan dana bidikmisi harus dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan pemerintah untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Penerima bidikmisi akan dibebankan pada berbagai kegiatan penunjang pada masa studinya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga terwujudnya sumber daya yang kompetitif. Namun beberapa fakta menunjukkan bahwa penyelenggaraan bidikmisi mengalami beberapa permasalahan seperti keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada terhambatnya aktivitas

mahasiswa dalam melaksanakan masa studinya, mahasiswa penerima bidikmisi yang tidak bisa menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan timbulnya potensi kecurangan akibat lemahnya pengawasan bidikmisi.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitasn program bidikmisi dengan megukur berdasarkan ketercapaian tujuan program bidikmisi. Peneliti memilih UNY sebagai salah satu PTN penyelenggara program bidikmisi untuk dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat bagaimana efektivitas program bidikmisi di UNY dengan melihat ketercapaian tujuan program bidikmisi yaitu pemerataan akses pendidikan, lulus tepat waktu, meningkatkan prestasi, semangat berkompetisi, sumber daya manusia berkualitas.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Peneliti

7. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana efektivitas program Bidikmisi berdasarkan ketercapaian tujuan bidikmisi?
- b. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program bidikmisi di UNY?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moh Nazir (2003:54) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Berdasarkan dengan hal ini, maka penulis mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dengan dukungan data yang diperoleh di lapangan dan buku-buku ataupun dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan program bidikmisi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga penelitian yang dilakukan diharapkan akan lebih mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Alasan memilih UNY karena UNY merupakan perguruan tinggi yang juga menyelenggarakan program bidikmisi sebagai bantuan sosial dalam dunia pendidikan tinggi agar masyarakat yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses pendidikan tinggi. Penelitian telah dilakukan pada 3 April 2016 hingga 24 Agustus 2016.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak/orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan terpercaya. Data tersebut berupa pernyataan keterangan maupun data-data yang dapat membantu peneliti untuk memahami permasalahan penelitian. Orang-orang atau pihak-pihak tersebut adalah:

1. Informan kunci (*key informan*), merupakan individu yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program bidikmisi di UNY :
 - a. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) UNY, Bapak Sukirjo, M.Pd
 - b. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNY, Bapak Dr. Suwarjo, M.Si
 - c. Dosen Ilmu Sejarah FIS UNY, Ibu Terry Irenwaty M.Hum sebagai mantan WD 3 FIS UNY
2. Informan pendukung, informan pendukung dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan mahasiswa yang bukan penerima beasiswa bidikmisi :
 - a. Mahasiswi MO
 - b. Mahasiswa WI
 - c. Mahasiswa SI
 - d. Mahasiswa BI
 - e. Mahasiswa SE

f. Mahasiswa UR

g. Mahasiswa DE

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Moleong (2010:9) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data yang utama. Peneliti mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pengumpulan data sehingga seakan-akan peneliti menjadi instrumen tunggal dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga dapat beradaptasi dengan perubahan fenomena yang ada di lapangan serta dapat berhubungan dengan obyek lainnya sehingga dapat memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen melakukan validasi terkait kesiapan melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan yakni Biro Akademik, Kemahasiswaan & Informasi, UNY. Adapun yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metodologi penelitian, penguasaan teori tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kebijakan pendidikan dan kebijakan sosial.

E. Sumber Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Data yang terkumpul digunakan sebagai bahan analisis untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut. Lofland dan Lofland (Moleong, 2014:157), mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut akan dijelaskan secara terperinci:

- 1) Data primer, yaitu data yang terdapat di tempat penelitian yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada responden mengenai penyelenggaraan program bidikmisi di UNY, wawancara dilakukan kepada Kepala BAKI UNY, Wakil Dekan 1, Tenaga Pendidik atau Dosen, Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan bukan penerima bidikmisi. Data primer dalam penelitian ini berupa ucapan dan tindakan langsung informan penelitian dilapangan yang diperoleh melalui wawancara. Adapun observasi di lingkungan UNY dengan mengamati aktivitas atau tindakan tepatnya pada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi UNY, Subbag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa, Subbag Sarana Pendidikan & Subbag Akademik di UNY serta mengamati aktivitas dan gaya hidup mahasiswa bidikmisi di UNY.
- 2) Data sekunder adalah data tertulis yang dapat diperoleh dari buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi, hasil-hasil studi seperti disertasi, tesis, jurnal, dan sebagainya (Moleong, 2014: 159). Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari UU RI Nomor 12 Pasal 5 tentang Pendidikan Tinggi, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Ssitem Pendidikan Nasional, UU RI No.12 pasal 76 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Pedoman Penyelenggraan Bantuan Dana Pendidikan

Bidikmisi Tahun 2015 dan Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa Bidikmisi
Universitas Negeri Yogyakarta Periode Sampai Dengan Semester Gasal
2015/2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian dokumen yang dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006:180). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan penelitian (key informan), dimana peneliti melakukan pertanyaan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memperoleh data primer yang relevan dan sistematis. Secara umum wawancara dilakukan kepada Kepala BAKI UNY, Wakil Dekan 1 FIP, Tenaga Pendidik atau Dosen, Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan bukan penerima bidikmisi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2011: 226) “Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari

perilaku tersebut”. Observasi yang digunakan yaitu observasi langsung yakni cara pengambilan data dengan menggunakan panca indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan kemudian didokumentasikan ke dalam catatan-catatan lapangan sebagai sumber informasi untuk diolah menjadi bahan analisis dalam pembahasan. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang Efektivitas Program Bidikmisi di UNY. Observasi telah dilakukan untuk mengamati:

- a. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi UNY;
- b. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi Subbag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa;
- c. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi di Subbag Sarana Pendidikan & Subbag Akademik; dan
- d. Tindakan informan dalam wawancara di Kantor Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi UNY, Kantor WD 1 FIP UNY, Ruang Dosen Ilmu Sejarah FIS UNY, serta di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi ialah pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

Sugiyono (2011:340) mengatakan bahwa studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang berupa dokumen tertulis dan dokumen gambar.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2010: 372), triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2014: 330). Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran dan mengklarifikasi data dan informasi yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer sehingga

peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid untuk membantu dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan terkait dengan efektivitas program bidikmidi di UNY

H. Teknik Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2014: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman.

Analisis data model Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2010: 164) menyebutkan bahwa ada empat alur kegiatan sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dialami, dan temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian yang merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap

berikutnya. Data yang dimaksudkan adalah data yang berhubungan dengan penyelenggaraan program beasiswa bidikmisi di UNY.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan menjadi data yang siap pakai. Catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali.

3. *Display* atau Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan menyusun berbagai informasi mengenai penyelenggaraan program bidikmisi di UNY dan kaitannya dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Dengan demikian laporan dari lapangan tentang data yang detail akan mudah digunakan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi serta mempermudah peneliti dalam melihat keseluruhan hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari

makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisa data kemudian membuat kesimpulan. Data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam susunan yang sistematis tersebut kemudian dianalisa guna menghasilkan sebuah kesimpulan efektivitas program bidikmisi di UNY.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu universitas atau perguruan tinggi negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak UNY ini berada di jalan Colombo, Kampus Karangmalang Yogyakarta. UNY merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang telah berdiri 21 Mei 1964. Sejarah panjang UNY dalam dunia pendidikan Indonesia telah menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas unggul. Banyak tenaga pengajar berkualifikasi S2 dan S3, pegawai profesional, perpustakaan universitas dan fakultas yang lengkap, pusat komputer, jaringan internet 24 jam, sarana olahraga berstandar internasional, pusat bahasa, laboratorium penelitian modern, dan lingkungan yang asri membuat kampus yang dijuluki The Green Campus ini menjadi salah satu universitas terfavorit dan layak diperhitungkan. Untuk menjawab tantangan global, mulai tahun 2008, UNY telah siap menuju *World Class University*.

UNY memiliki Visi pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Untuk mewujudkan visi tersebut dipermudah dengan beberapa langkah yang termuat dalam misi dan tujuan UNY, sebagai berikut.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan yang didukung bidang non-kependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul berdaya saing di tingkat regional yang mengutamakan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan global.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik dan bersih, serta membangun jejaring dan kemitraan dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan UNY

1. Terwujudnya lulusan yang berjati-diri dan berdaya saing di tingkat regional, bertakwa, mandiri, dan cendekia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
2. Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat yang mendukung pembangunan daerah dan nasional serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan global.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dan

4. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

b. Gambaran Umum Program Bidikmisi

1. Pengertian Bidikmisi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

2. Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bidikmisi

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015, menyebutkan misi, tujuan, serta sasaran program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Antara lain :

Misi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

- 2) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

- 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
- 2) Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 4) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif;
- 5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuklain yang sederajat tahun 2014 dan 2015 yang tidak mampu secara ekonomi dan memilikipotensi akademik baik.

3. Organisasi Pelaksana

A. Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

B. Pengelola Pusat

1. Pengarah

- a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ketua);
- b. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan

2. Penanggung Jawab Program

- a. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Koordinator);
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

3. Tim Pelaksana

- a. Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ;
- b. Pimpinan perguruan tinggi negeri;
- c. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
- d. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Satuan Kerja Direktorat Kemahasiswaan;

4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat

- a. Menyusun rancangan program dan atau Pedoman Penyelenggaraan;
- b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi;
- c. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran on-line;
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
- e. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi;
- f. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;
- g. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana/TIK PT;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- i. Memberikan pelayanan pengaduan;
- j. Memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan.

C. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis

1. Penanggung jawab
 - a. Pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi;
 - b. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV.

2. Pelaksana
 - a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I - XIV
 - c. Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang ditunjuk;
 - d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi;
 - e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.

3. Tugas dan Tanggung Jawab
 - Perguruan Tinggi
 - a. Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayahnya;
 - b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
 - c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi
 - d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
 - e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
 - f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
 - g. Monitoring dan evaluasi internal;
 - h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

 - Kopertis:
 - a. Mendistribusikan kuota Bidikmisi untuk mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di wilayahnya;

- b. Melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi di wilayahnya;
- c. Melakukan verifikasi calon mahasiswa penerima Bidikmisi PTS di wilayahnya;
- d. Menetapkan dengan Surat Keputusan penerima Bidikmisi;
- e. Menyalurkan dana resettlement pada mahasiswa yang berhak;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Merekomendasikan penggantian penerima Bidikmisi;
- h. Membantu PTS melaporkan IPK melalui sistem daring;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan Bidikmisi dan dana resettlement.

4. Persyaratan Dan Kuota

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2015;
2. Lulusan tahun 2014 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
 - b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
 - c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
 - d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;

5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS

5. Pendanaan

A. Jangka Waktu Pemberian

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, 6 (enam) semester untuk program Diploma III, serta Akademi Komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II, dan 2 (dua) semester untuk program Diploma I.
2. Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
 - a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - b. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - c. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - d. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.

- e. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
3. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.
 4. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan biaya pendidikan yang bersumber dari dana lain yang sah.

B. Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
 - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi;
 - b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi;

- c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan:
- a. Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan melalui SK Rektor/Direktur/Ketua;
 - b. Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama.
 - c. Perguruan Tinggi dapat mengubah besaran bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa dengan cara mengurangi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

4. Biaya Kedatangan

Biaya kedatangan atau resettlement di alokasikan sesuai kebutuhan dengan ketentuan:

- a. Penggantian biaya transport mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan).
- b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan.
- c. Biaya pengelolaan (seleksi kelayakan dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis).
- d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll.

5. Hal khusus

- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
- c. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya
 - 1) Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus.
 - 2) Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan perguruan tinggi.
 - 3) Hal hal lainnya yang relevan.

C. Penyaluran Dana

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap pada bulan Maret-Agustus dan periode semester gasal pada bulan September- Februari sesuai dengan kalender akademik;
2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester gasal;
3. Biaya kedatangan (resettlement) diberikan setelah ada penetapan penerima Bidikmisi berdasarkan kebutuhan dan diberikan melalui mekanisme kontraktual;
4. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi, ke:
 - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan; dan
 - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

6. Mekanisme Seleksi

A. Sosialisasi dan Koordinasi

1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan koordinasi dan sosialisasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional

mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media massa;

2. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya tentang program Bidikmisi;
3. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
4. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mensosialisasikan program Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12.
5. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi negeri yang dituju tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

Adapun tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring adalah sebagai berikut.

1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi
 - a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/>

dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 2 bagian F) untuk

- b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja.
 - c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui [http:// bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login](http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login) menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi
 - d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing masing siswa yang sudah direkomendasikan
 - e. Siswa mendaftar melalui laman [http:// bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login](http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login) dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.
- a. SNMPTN melalui [http:// snmptn.ac.id](http://snmptn.ac.id)
 - b. SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>.
 - c. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.

- d. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing
PTS

7. Monitoring dan Pengawasan Bidikmisi

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bidikmisi. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut.

- 1) Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Bidikmisi telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepadamahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
- 2) Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Belmawa.
- 3) Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi dan pencairan dana
- 2) Penyaluran dan atau penggunaan dana
- 3) Pelayanan dan atau pembinaan mahasiswa
- 4) Administrasi keuangan
- 5) Pelaporan

Sementara Monitoring dalam pengelolaan bidikmisi dilakukan

oleh:

a. Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus menyusun laporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sejauh mana pelaksanaan program apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah

1) Data statistik

Statistik Penerima Bantuan berisi tentang mahasiswa penerima bantuan tiap perguruan tinggi. Tim Pusat menyusun statistik penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen PT

2) Penggunaan dana

Berisikan tentang besar dana yang disalurkan tiap PT untuk setiap program studi, serta berapa yang telah diserap. Tim Pusat

menyusun laporan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim PT.

3) Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

b. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim PT melaporkan semua kegiatan hasil monitoring yang berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan program:

1. Sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan;
2. Hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi;
3. Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut;

Rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.

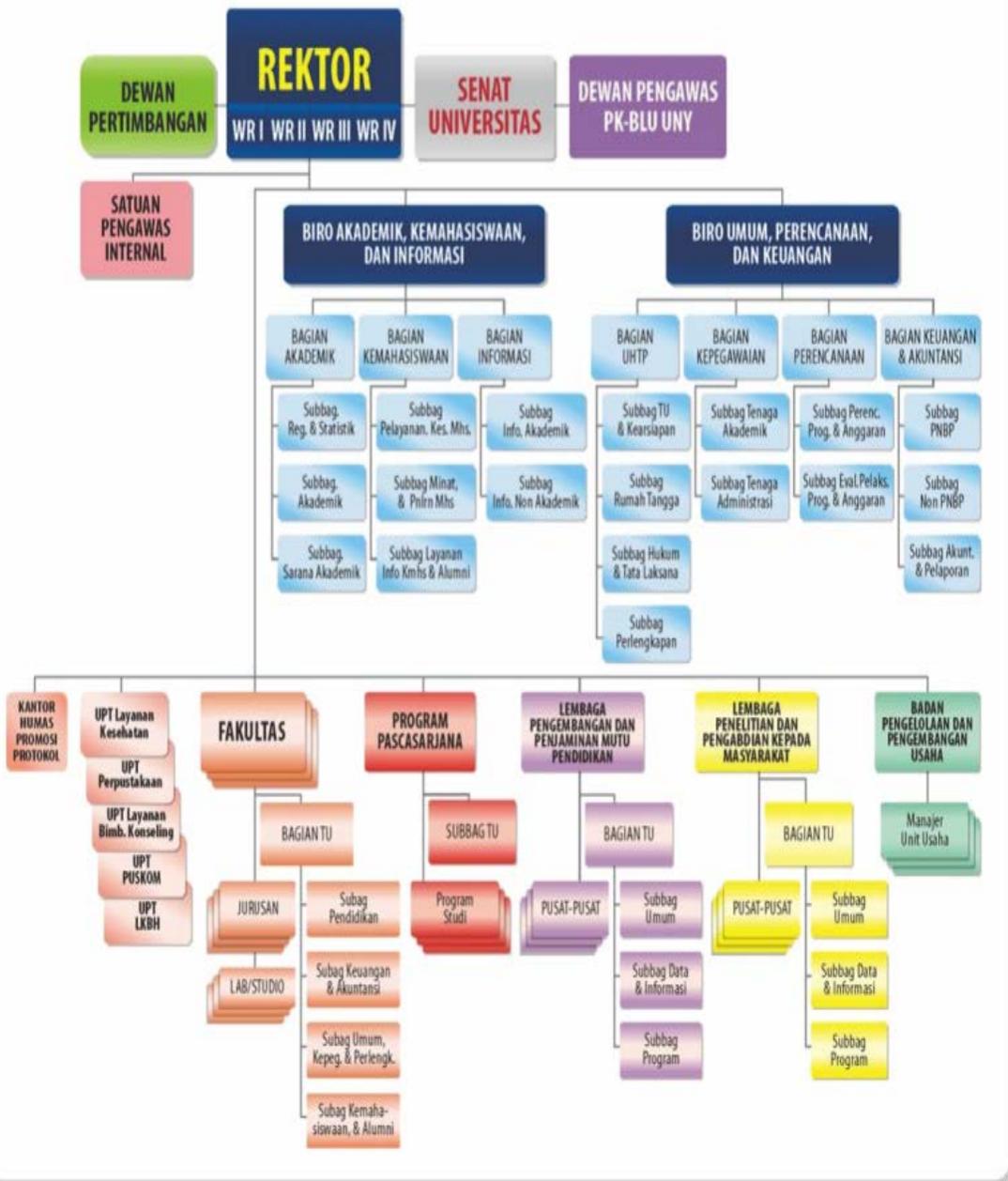
c. Gambaran Umum Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) UNY

Keberadaan BAKI di UNY adalah sebagai Tim Pengelola Bidikmisi di UNY sekaligus sebagai unit pelaksana pada bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan informasi, yang mampu menunjang pembangunan dan pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta yang diwujudkan dengan misi antara lain, (i) Menyelenggarakan layanan akademik yang berkualitas dan profesional bagi masyarakat belajar di dalam maupun di luar kampus, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. (ii) Menyelenggarakan layanan kemahasiswaan yang berkualitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang kegiatan kurikuler. (iii) Menyelenggarakan layanan informasi yang berkualitas dan profesional, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengolahan data dan informasi.

Sejalan dengan misi tersebut BAKI juga berkomitmen untuk mencapai tujuan keberhasilan sebagai unit pelaksana pada bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan informasi. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut, Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelaksana administrasi pendidikan dan evaluasi, registrasi dan statistik, sarana pendidikan, dan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelaksana administrasi



STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Gambar 3. Struktur Organisasi UNY
Sumber : web.uny.ac.id (2016)

2. Deskripsi Hasil Data Penelitian

Berikut deskripsi data yang berisi informasi mengenai Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta.

a. Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari tujuan bidikmisi berkaitan dengan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan terhadap akses pendidikan tinggi didukung ungkapan wawancara kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum selaku Dosen Ilmu Sejarah FIS UNY yang terangkum dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“bidikmisi memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki semangat untuk terus belajar hingga jenjang pendidikan tinggi dan memiliki potensi akademik baik namun tidak beruntung secara finansial. Artinya bidikmisi merupakan suatu langkah pemerintah yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan.” (wawancara Kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum pada tanggal 9 Juni 2016)

Program bidikmisi telah berkontribusi dengan baik dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh manfaat dari program telah dirasakan oleh setiap pihak, baik penyelenggara program maupun sasaran program. Selanjutnya penyelenggara program bidikmisi dalam hal ini yaitu UNY harus memperhatikan aspek keadilan yang diberikan oleh penyelenggara

mapaun tim pengelola bidikmisi UNY kepada seluruh mahasiswa bidikmisi di UNY. Keadalian tersebut bermakna bahwa setiap mahasiswa bidikmisi UNY mendapatkan perlakuan, perhatian, dan hak yang sama. Penyelenggara dan pengelola bidikmisi juga harus mendukung rangkaian kegiatan seluruh mahasiswa bidikmisi untuk perkembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik aktivitas dalam bidang akademik maupun non akademik. Selain itu, penyelenggara dan pengelola bidikmisi juga menjamin bahwa setiap penerima bidikmisi adalah individu yang dinyatakan benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin namun memiliki keunggulan dari segi akademik. Maka dalam hal ini seluruh sasaran program bidikmisi harus dinyatakan tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola bidikmisi UNY menjamin bahwa setiap individu yang berhak mendapat dana bantuan bidikmisi adalah mereka yang benar-benar dikategorikan layak seperti ketentuan dari program bidikmisi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Seluruh peserta bidikmisi diseleksi melalui proses yang ketat berdasarkan informasi yang akurat. Proses penyeleksian bidikmisi dilakukan dengan mengecek dokumen pelamar bidikmisi. Selanjutnya universitas membentuk tim untuk melakukan survey ke rumah calon peserta bidikmisi untuk memastikan bahwa peserta bidikmisi memang berasal dari keluarga yang dikategorikan miskin namun memiliki potensi akademik baik. Kemudian dilakukan

validasi agar dokumen yang telah dikirim oleh calon peserta bidikmisi dapat diproses agar dapat disetujui oleh universitas. Universitas juga dalam hal ini bekerjasama dengan pihak terkait seperti SMA tempat peserta bidikmisi bersekolah. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan agar sasaran bidikmisi benar-benar tepat dan mereka yang mendapatkan bantuan dana pendidikan adalah mereka yang dinyatakan layak dan berhak.” (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Lebih lanjut narasumber juga menyatakan bahwa,

“Sejauh ini sasaran program bidikmisi tepat mas, karena apabila ditemukan adanya indikasi kecurangan maka pihak kampus akan segera menindaklanjuti.” (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Namun, temuan dilapangan menunjukkan adanya kejanggalan pada mahasiswa bidikmisi yang dinilai tidak mencerminkan sosok mahasiswa penerima bidikmisi. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam kutipan wawancara narasumber sebagai berikut :

“saya melihat temen sekelas saya mahasiswa penerima bidikmisi namun tidak seperti mahasiswa bidikmisi kebanyakan mas. Dia ke kampus mengendari sepeda motor dan juga saya lihat dia sering gonta-ganti *Handphone*. Bahkan dikelas dia bukan mahasiswa yang aktif. Saya rasa tidak sepatasnya mahasiswa tersebut mendapatkan bantuan dana bidikmisi mas.” (wawancara Mahasiswa SE pada tanggal 5 Juni 2016)

Pernyataan tersebut tentunya sungguh disayangkan sebab menimbulkan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pengelola bidikmisi di UNY. Seharusnya dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan kegiatan pendidikan dapat terdistribusi dengan adil dan

merata kepada kelompok yang memerlukan dukungan untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, kemungkinan indikasi penyalahgunaan bantuan dana bidikmisi dinilai sangat kecil dan jumlahnya dipastikan tidak banyak. Pihak universitas juga langsung menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi-indikasi kecurangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan narasumber yang dikutip dalam wawancara sebagai berikut :

“...memang pernah terjadi indikasi kecurangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa tapi presentasinya kecil dan segera ditindak lanjuti oleh universitas. Dengan pemberian sanksi berupa pembinaan hingga penghentian dana bidikmisi misi mas. Dengan kata lain bantuan dana bidikmisi telah benar-benar diberikan kepada peserta yang sesuai dengan ketentuan bidikmisi. Yaitu berpotensi akademik yang baik namun berasal dari keadaan ekonomi yang tidak beruntung.” (wawancara Kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum pada tanggal 9 Juni 2016)

Ungkapan tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Dekan I FIP UNY, sebagaimana yang dimuat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“...saya tau ada beberapa yang tidak tepat itu angkatan pertama yaitu angkatan 2010 tapi setelah saya telusuri itu bukan kesalahan yang bersangkutan karna yang bersangkutan juga mendapatkan tugas dari sekolahnya tapi di juga tau diri jadi sebagian danannya disampaikan juga kepada temannya yang membutuhkan, namun sepanjang pengetahuan saya yang di FIP itu tepat jika saya temukan ada mahasiswa bidikmisi yang menggunakan dananya bukan untuk pengembangan akademik maka akan saya ingatkan dan saya bina. Jadi sepanjang pengetahuan saya sasarannya tepat. Mungkin itu di tahun 2010 karna tidak di verifikasi langsung. (wawancara Kepada Dr. Suwarjo, M.Si pada tanggal 26 Juli 2016)

Senada dengan ungkapan oleh mahasiswa UR yang menyatakan bahwa kemungkinan indikasi kecurangan sangatlah kecil. Sasaran program bidikmisi dapat dikatakan sudah tepat. Berikut kutipan wawancara kepada narasumber :

“tidak ada kalau menurut saya mas. Tentu kita tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya dari seseorang dan menurut saya walaupun dari segi ekonomi dia sangat mampu tidak mungkin ikut bidikmisi. Disekolah saya seleksi sangat ketat mas, bukan hanya kurang dari segi ekonomi saja namun prestasi siswa juga diperhatikan. jadi jika secara akademis tidak memenuhi maka juga dipastikan bahwa siswa tersebut masuk dalam kategori penerima bidikmisi. Walaupun mungkin terdapat penyimpangan yang terjadi misalnya pihak sekolah sengaja meluluskan beberapa siswa. Namun pada dasarnya regulasi yang dibuat cukup ketat jadi memang sulit untuk mendapatkan bantuan dana bidikmisi. Itu sejauh yg saya rasakan mas.” (wawancara Kepada Mahasiswa UR pada tanggal 8 Juni 2016)

Keadilan terhadap penyelenggaraan bidikmisi menjadi perhatian penting bagi tim pengelola bidikmisi. Hal ini diperlukan agar tidak ada opini lain yang berkembang diluar dan mengarah kepada opini yang negatif terhadap pengelolaan bidikmisi sehingga pemerataan terhadap akses pendidikan tinggi dapat terwujud, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan program bidikmisi bidikmisi. Untuk mendukung penyelenggaraan program bidikmisi yang adil dan merata, tim pengelola bidikmisi UNY juga membenarkan adanya pemberian sanksi kepada setiap mahasiswa bidikmisi UNY yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kriteria penerima bidikmisi. Sanksi diberikan kepada mahasiswa

yang dinilai tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Hal ini seperti yang ungkapkan narasumber dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Jika ditemukan adanya mahasiswa bidikmisi yang tidak melaksanakan kewajibannya maka fakultas melakukan pembinaan agar mereka sadar memiliki tanggungjawab sebagai penerima bidikmisi. Namun, apabila masalah terlalu dilakukan mahasiswa terlalu berat maka sanksi yang diberikan seperti Beasiswa dicabut apabila menikah atau IP turun terus setiap semesternya dan juga apabila ditemukan indikasi pemalsuan data.”
(wawancara Kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum pada tanggal 9 Juni 2016).

b. Meningkatkan Prestasi & Semangat Berkompetisi

Pengelolaan bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan oleh BAKI sebagai unit pelaksana pada bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan informasi. Selain itu pada level fakultas WD 3 dipercaya sebagai bidang kemahasiswaan untuk turut serta memonitoring mahasiswa penerima bidikmisi. Untuk mengetahui keberhasilan program bidikmisi maka mahasiswa penerima bidikmisi perlu diberdayakan secara maksimal. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan tersebut, maka universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program bidikmisi. Monitoring dan evaluasi dilakukan

agar program berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta mengatasi tantangan ataupun hambatan program.

Pemberdayaan terhadap mahasiswa bidikmisi akan meningkatkan kualitas dari setiap individu penerima bidikmisi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari perkembangan Indeks Prestasi mahasiswa bidikmisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penerima bidikmisi unggul dalam prestasi akademik bahkan di dukung pula dengan prestasi non akademik. Hal ini seperti yang juga diungkapkan oleh Kepala BAKI UNY dalam kutipan wawancara narasumber sebagai berikut :

“Sepanjang individu serius menjalankan kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa bidikmisi prestasi terus meningkat. Rata-rata mahasiswa bidikmisi memang memiliki prestasi yang baik secara akademik dan non akademik. Lebih dari 50 % IPK signifikan dan prestasi akademis bidikmisi UNY diatas rata-rata nasional mas.” (Wawancara Kepada Bapak Sukirjo, M.Pd pada tanggal 15 Juni 2016)

Lebih lanjut kemudian narasumber mengatakan bahwa,

“Bidikmisi memberikan motivasi untuk terpacu dalam berkompetisi kepada seluruh mahasiswanya mas. Contohnya Semua mahasiswa bidikmisi harus terlatih membuat proposal karya ilmiah. Selain itu ada pembinaan dikemahasiswaan untuk mendorong mereka untuk turut berkompetisi. Bahkan tidak sedikit yang berkompetisi hingga tahap nasional. Baik itu kompetisi pada kegiatan akademi ataupun non akademik. Banyak bidikmisi yang aktif membuktikan kemampuannya dengan menorehkan prestasi. Univeristas juga memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa bidikmisi.” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2016)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa universitas telah berupaya memberdayakan mahasiswa bidikmisi dengan turut serta

mendukung dan membina mahasiswa bidikmisi untuk berkarya dan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan prestasinya dan ketercapaian program dapat berhasil.

Bidikmisi sebagai sebuah program merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang berlatar belakang kemampuan ekonomi rendah. Kepedulian tersebut mengacu pada sebuah tujuan untuk mewujudkan impian masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berperan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan baik akademik maupun non akademik. Keseriusan perguruan tinggi dalam mengelola program bidikmisi agar dapat terdistribusi dengan baik kepada mahasiswa penerima bidikmisi dapat dilihat dari keseriusannya dalam memberdayakan mahasiswanya. Sejalan dengan hal tersebut, wujud keseriusan UNY dalam memberdayakan mahasiswa bidikmisi untuk berpacu dalam kompetisi untuk meningkatkan prestasi juga dirasakan oleh salah seorang mahasiswi bidikmisi dari FMIPA UNY seperti yang dikutip sebagai berikut :

“...karena di jurusan saya mahasiswa bidikmisi dituntut harus IP diatas 3, aktif organisasi dan aktif berprestasi- minimal pernah ikut PKM gitu. Jadi ya kadang sesama anak bidik misi saingan, di kelas saya beberapa IPK tertinggi selalu anak bidik misi biasanya anak bidik misi di kelas saya IP rata-rata diatas 3,6. Hal ini memicu semangat mahasiswa bidikmisi untuk berkompetisi, kemudian di

Ormawa FMIPA sendiri banyak petinggi-petinggi nya yang anak bidik misi seperti ketua HIMA Kimia 2014 dan sekjen bem fmipa 2015 itu anak bidikmisi. IP saya selalu stagnan dari semester 1 -5 yaitu 3,81 kemudian turun saat semester 6 sampai saya lulus jadi 3,78. kemungkinan turun karena saya yang tidak cermat membagi waktu kuliah dengan kegiatan organisasi.” (Wawancara Mahasiswi MO pada tanggal 2 Juni 2016)

Senada dengan ungkan tersebut narasumber WI juga menyatakan bidikmisi membuatnya berpacu untuk meningkatkan prestasi. sebagaimana yang dimuat dalam kutipan wawancara narasumber berikut :

“...menjadi seorang mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi membuat saya semangat untuk mengejar prestasi mas, setiap semester saya berupaya agar IP saya terus meningkat. Ini sebagai bukti keseriusan saya dalam mengejar cita-cita. Rasanya sangat disayangkan jika mahasiswa penerima bidikmisi tidak mendapatkan prestasi yang baik mas, sebab universitas juga mendukung segala bentuk kegiatan mahasiswa penerima bidikmisi. Sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas juga sudah disediakan.” (wawancara Kepada Mahasiswa WI pada tanggal 3 Juni 2016)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Yogyakarta yang memuat data statistik hasil studi (IPK & SKS) angkatan 2102 sampai dengan semester Gasal tahun akademik 2015/2016. Adapun hasil laporan tersebut sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2012

NO	FAKULTAS	SEBARAN IPK									
		< 2.50	%	2.51 - 2.75	%	2.76 - 3.00	%	3.01 - 3.50	%	> 3.50	%
1	FIP	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00	61	28.24	155	71.76
2	FBS	0	0.00%	1	0.48%	7	3.37	124	59.62	76	36.54
3	FMIPA	0	0.00%	1	0.60%	5	2.98	83	49.40	79	47.02
4	FIS	0	0.00%	0	0.00%	1	0.60	79	47.31	87	52.10
5	FT	0	0.00%	1	0.68%	6	4.08	80	54.42	60	40.82
6	FIK	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00	46	57.50	34	42.50
7	FE	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00	50	43.86	64	56.14
	UNY	0	0.00%	3	0.27%	19	1.73 %	523	47.55 %	555	50.45 %

Sumber : Biro Akademik Kemahasiswaan Dan Informasi
Universitas Negeri Yogyakarta Maret 2016

Berdasarkan 5 kategori capaian IPK, sebaran terbesar berada pada kategori IPK > 3.50 yaitu 555 mahasiswa (50,45%). Selanjutnya kategori 3.01 s.d. 3.50 berada pada posisi kedua dengan jumlah mahasiswa 523 (47,55%), disusul kategori IPK 2.76 s.d. 3.00 dengan jumlah mahasiswa 19 (1,73%). Ketiga kategori tersebut apabila digabungkan, persentasenya mencapai 99,73% dari total mahasiswa bidikmisi angkatan 2012, hal ini tentu merupakan capaian yang cukup memuaskan. Hanya saja, 0,27% sisanya (3 orang mahasiswa) berada pada kategori capaian IPK yang rendah yaitu kategori IPK 2.51 s.d. 2.75.

c. Lulus Tepat Waktu

Keberhasilan penyelenggaraan bidikmisi di UNY dapat dilihat dari bagaimana penyelenggara program dan sasaran program mampu

merespon dengan baik segala bentuk kebijakan dari program bidikmisi. Komitmen penyelenggara bidikmisi di UNY dapat dilihat dari tanggapan pelaksana kebijakan yang berperan aktif dalam menyelenggarakan program bidikmisi di UNY. Hal ini seperti yang diungkapkan narasumber dalam kutipan wawancara berikut :

“sejauh ini mas respon kami sebagai pelaksana kebijakan sangat positif mas dengan adanya program bidikmisi. Sebagai pelaksana kami saling berkoordinasi agar program bidikmisi terselenggara dengan baik di UNY. Seperti koordinasi antara WD 1 sebagai pemantau aktivitas akademik dan WD 3 sebagai pemantau aktivitas kemahasiswaan, serta koordinasi dengan dosen pembimbing akademik. Kami memberikan pelatihan serta pembinaan terhadap mahasiswa bidikmisi untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan minat bakat yang dimiliki.” (wawancara Kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum pada tanggal 9 Juni 2016)

Senada dengan hal tersebut Kepala BAKI UNY juga mengungkapkan responsivitasnya sebagai pelaksana kebijakan, seperti yang dimuat dalam kutipan wawancara berikut :

“...tentunya kami sebagai pelaksana kebijakan harus berperan aktif mas agar tujuan program bidikmisi ini dapat tercapai. Berbicara mengenai wujud responsivitas maka hal yang telah dilakukan adalah pemantauan terhadap aktivitas akademik secara periodik atau biasa disebut monitoring. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi ataupun mengentaskan masalah yang terjadi mas. Kami juga memfasilitasi mahasiswa bidikmisi dengan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan akademiknya ataupun bakatnya.” (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Sementara itu komitmen yang terbangun pada mahasiswa bidikmisi terlihat dari bagaimana mahasiswa bidikmisi memanfaatkan peluang yang

telah diberikan oleh pemerintah untuk dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Program bidikmisi dikatakan berhasil apabila mampu membangun semangat mahasiswa bidikmisi untuk membangun komitmen agar mampu bertanggungjawab terhadap kewajibannya.

Komitmen tersebut terlihat dari keseriusan mahasiswa bidikmisi dalam menyelesaikan masa studinya serta bagaimana mahasiswa bidikmisi dapat termotivasi terhadap penyelenggaraan program bidikmisi. Adapun motivasi yang dimaksudkan adalah bagaimana program bidikmisi mampu memberikan pengaruh kepada mahasiswa bidikmisi untuk memaksimalkan usahanya dan tidak menyianyikan kesempatan yang telah diberikan. Dalam hal ini mengenai kesadaran akan tanggungjawab mahasiswa bidikmisi dalam menyelesaikan masa studinya hingga tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, bidikmisi mampu memberikan motivasi yang kuat terhadap mahasiswa bidikmisi. Seperti yang diungkapkan narasumber dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“...saya menyadari bidikmisi adalah beasiswa yang dananya adalah berasal dari negara dimana negara juga menerima dana itu dari masyarakat indonesia. Ada sebuah tanggung jawab yang diterima oleh mahasiswa bidikmisi, malu rasanya klo udah di kasih tapi ga menunjukkan yang terbaik.” (wawancara Kepada Mahasiswa BI pada tanggal 1 Juni 2016)

Senada dengan hal tersebut, mahasiswa UR juga merasakan hal yang sama. Dimana bidikmisi mampu memotivasi dirinya untuk lebih bersemangat dalam menempuh masa studinya. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber dalam kutipan wawancara berikut :

“saya menyadari ketentuan dari program bidikmisi diantaranya IPK minimum 2.75 dan harus aktif dalam kegiatan mahasiswa serta yang pasti harus cepat lulus maximum 8 semester dan sanksinya apabila tidak memenuhi hal tersebut ya dikeluarkan dari bidikmisi. Hal tersebutlah yang membuat saya tidak boleh menyerah dan terus berjuang sebab saya tahu tidak semua orang usia mendapatkan kesempatan ini. Kebijakan program bidikmisi tersebut memotivasi saya untuk berusaha lebih baik lagi.”(wawancara Kepada Mahasiswa BI pada tanggal 3 Juni 2016)

Program dikatakan mampu untuk diperhankan tentunya ketika melihat bagaimana tujuan program dapat tercapai. Salah satu tujuan bidikmisi yang dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana sasaran program memberikan respon terhadap program ialah lulus tepat waktu. Tentu hal tersebut juga menjadi harapan seluruh mahasiswa baik penerima bidikmisi ataupun bukan perima bidikmisi. Dibutuhkan keyakinan dan komitmen untuk dapat mewujudkannya. Masa studi maksimum 8 semester untuk jenjang S1 harus mampu dicapai oleh seluruh mahasiswa bidikmisi tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukirjo, M.Pd bahwa sebagian besar mahasiswa bidikmisi mampu menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara narasumber berikut :

“...sekitar 70% peserta bidikmisi dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Jumlah perbandingan antara yang lulus dan belum lulus cukup berbeda jauh mas. Maka dapat dikatakan sebagian besar peserta bidikmisi mampu menjalankan kewajiban serta komitmennya.” (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Senada dengan hal tersebut, Wakil Dekan I FIP UNY juga mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa bidikmisi mampu menyelesaikan masa studinya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang termuat dalam kutipan wawancara berikut :

“sejauh ini sebagian besar mahasiswa bidikmisi UNY telah membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan masa studinya dengan tepat waktu. Artinya mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mungkin hampir 75% berhasil lulus tepat waktu mas.” (wawancara Kepada Wakil Dekan I FIP UNY pada tanggal 26 Juli 2016)

Ungkapan tersebut juga diperkuat berdasarkan laporan Tim pengelola bidikmisi mengenai capaian kelulusan mahasiswa bidikmisi angkatan 2011 yang dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Angkatan 2011

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa	Lulus	%	Belum Lulus	%
1	FIP	81	71	87,65	10	12,35
2	FBS	101	64	63,37	37	36,63
3	FMIPA	97	80	82,47	17	17,53
4	FIS	65	51	78,46	14	21,54
5	FT	78	38	48,72	40	51,28
6	FIK	33	27	81,82	6	18,18
7	FE	45	35	77,78	10	22,22
UNY		500	366	73,20	134	26,80

Sumber : Biro Akademik Kemahasiswaan Dan Informasi
Universitas Negeri Yogyakarta Maret (2016)

Jumlah mahasiswa bidikmisi angkatan 2011 yang sudah lulus mencapai 366 Mahasiswa (73,20%), sedangkan 134 lainnya (26,80%) belum lulus. Sementara itu berdasarkan lamanya waktu studi yang ditempuh mahasiswa bidikmisi termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Angkatan 2011

No	Fakultas	Jumlah Lulusan	IPK Terendah	Rerata IPK	IPK Tertinggi	Masa Studi Tercepat			Rerata Masa Studi	
						Tahun	Bulan	Hari	Tahun	Bulan
1	FIP	71	3,31	3,58	3,82	3	5	26	3	10
2	FBS	64	3,00	3,50	3,86	3	7	0	3	10
3	FMIP	80	2,86	3,49	3,88	3	7	0	3	9
4	FIS	51	3,10	3,48	3,71	3	7	0	3	9
5	FT	38	3,00	3,45	3,76	3	7	29	3	10
6	FIK	27	3,23	3,47	3,90	3	5	26	3	9
7	FE	35	3,27	3,62	3,89	3	4	29	3	10
	UNY	366	2,86	3,52	3,90					

Sumber : Biro Akademik Kemahasiswaan Dan Informasi
Universitas Negeri Yogyakarta Maret (2016)

d. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Program bidikmisi yang turut diselenggarakan UNY sejak Tahun 2010 merupakan amanah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk memberikan kesempatan kepada setiap lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dengan memanfaatkan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bidikmisi. Selain bertujuan agar kelompok masyarakat dengan kategori miskin dapat berkuliah, bidikmisi juga mengemban tugas mulia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan . Dengan harapan apabila masyarakat memiliki pendidikan yang layak maka angka kemiskinan akan berkurang. Tentunya cita-cita Negara untuk mewujudkan Negara yang makmur dan sejahtera dapat tercapai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Tujuan program bidikmisi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan unggul pada bidangnya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pemerataan terhadap akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, selama 6 tahun UNY telah berhasil menyelenggarakan program bidikmisi. Begitu besar manfaat yang dirasakan berkat adanya program bidikmisi. Keberhasilan UNY dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari peningkatan prestasi akademik mahasiswa yang gemilang,

konsistensi mahasiswa dalam menjalankan masa studinya hingga lulus tepat waktu dan semangat mahasiswa bidikmisi untuk terus berkembang maju dan memanfaatkan dengan baik peluang yang diberikan program bidikmisi. Manfaat tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasiswi penerima bidikmisi UNY, seperti yang dimuat dalam kutipan wawancara berikut :

“...begitu besar manfaat ya saya rasakan dengan adanya program bidikmisi ini mas. Seperti memberi kesempatan bagi para pelajar Indonesia yang mempunyai kemauan untuk terus belajar di bangku perkuliahan dan di satu sisi memiliki keterbatasan ekonomi serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi warga Negara Indonesia sendiri.” (wawancara kepada Mahasiswi OM pada tanggal 2 Juni 2016)

Lebih lanjut Mahasiwi OM juga mengatakan bahwa,

“Selain gratis biaya kuliah, mahasiswa juga mendapat uang saku bulanan mas yang sangat menunjang studi. Apalagi untuk anak rantau, karena kebanyakan mahasiswa bidikmisi jarang dikirim uang saku dari orangtua, kami sangat bergantung sekali dengan uang saku bulanan dari bidikmisi yang sangat membantu dalam memenuhi kehidupan sehari - hari di tanah rantau yang otomatis juga membantu memperlancar studi di tanah rantau. Di jurusan saya juga sering ada sosialisasi untuk bidik misi, misalnya mengenai motivasi tips dan trik agar studi berjalan baik dan lulus tepat waktu serta info tentang beasiswa LPDP. Saya rasa bagi siapapun penerima bidikmisi mereka adalah orang yang terpilih dan beruntung karena begitu besar manfaat yang kami rasakan mas.” (wawancara kepada Mahasiswi OM pada tanggal 2 Juni 2016)

Senada dengan pernyataan tersebut, manfaat yang juga dirasakan dari program bidikmisi juga diungkapkan oleh mahasiswa bidikmisi UNY

dari Fakultas Ilmu Sosial yang dirangkum dalam kutipan wawancara narasumber sebagai berikut :

“...dari awal kuliah sampai akhir saya rasakan begitu banyak manfaat dari program bidikmisi mulai dari uang per semester, *living cost* per bulan, uang yudisium, wisuda, toga, walaupun untuk IKA toga tidak sepenuhnya namun sudah sangat membantu. Ditambah lagi kemudahan dalam bimbingan skripsi karena mendapatkan akses setiap hari walaupun dalam pelaksanaannya tetap 2 kali dalam seminggu yang saya lakukan.” (wawancara Kepada Mahasiswa UR pada tanggal 3 Juni 2016)

Peran bidikmisi untuk meningkatkan kualitas individu begitu besar dirasakan oleh setiap penerima bidikmisi. Segala akses kemudahan untuk meraih mimpi menjadi seorang sarjana serta merasakan menimba ilmu pada jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan pemerintah untuk melahirkan program bidikmisi merupakan sebuah langkah yang tepat agar terwujudnya pemerataan akses pendidikan tinggi tanpa memandang kelompok sosial manapun. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh narasumber dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“...manfaatnya sangat bagus mas dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang tidak mampu. Meningkatkan motivasi untuk orang yang ingin berkuliah jadi tidak ada alasan orang yang punya potensi akademik tinggi tidak bisa kuliah. Bidikmisi juga sebagai program unggulan dipendidikan tinggi Karena pro rakyat. Manfaat itu untuk NKRI dengan harapan mereka menjadi pejuang-pejuang penerus bangsa yang memiliki etos kerja tinggi.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Lebih lanjut narasumber mengatakan bahwa,

“Melalui program ini generasi penurus tidak hanya lagi bermimpi untuk dapat merasakan jenjang pendidikan tinggi mas. Artinya bidikmisi berkontribusi besar dalam meningkatkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Sementara itu wujud nyata lainnya keberhasilan program bidikmisi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas terlihat dari keaktifan mahasiswa bidikmisi dalam mengikuti kegiatan non akademik yang mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti yang dimuat dalam kutipan wawancara berikut :

“..di FIP sendiri ada seorang mahasiswa bidikmisi bernama saidah dari jawa barat dia mapres FIP lalu maju menjadi mapres uny yang berperestasi dari segi kegiatan non akademik maupun akademik dia juga sering lomba kepemimpinan dan aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian besar yang aktif PKM itu sebagian besar anak bidikmisi.” (wawancara Wakil Dekan I FIP UNY pada tanggal 26 Juli 2016)

Lebih lanjut narasumber juga mengatakan mengenai prestasi lain mahasiswa bidikmisi sebagai bukti nyata penyelenggaran bidikmisi mampu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti dalam kutipan wawancara berikut :

“...Bahkan mahasiswa yang angkatan 2010 dan 2011 mas sebagian besar sudah melanjutkan studi S2 nya dengan beasiswa LPDP. Selaian itu ada juga mahasiswa kami yang mau berangkat ke Inggris dan Australia untuk melanjutkan studinya. Ini adalah kesempatan emas untuk mereka dalam meningkatkan kualitas dirinya mas.” (wawancara Wakil Dekan I FIP UNY pada tanggal 26 Juli 2016)

Sementara itu untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap mahasiswa bidikmisi di UNY maka pihak penyelenggara harus mampu memandirikan mahasiswa bidikmisi dan memastikan bahwa setiap mahasiswa bidikmisi dapat melaksanakan kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan dalam diri mahasiswa bidikmisi. Dalam hal ini UNY sebagai penyelenggara berupaya memandirikan mahasiswa bidikmisi dengan menghimbau agar mahasiswa bidikmisi lebih aktif dan lebih *update* mengenai informasi terhadap penyelenggaraan program bidikmisi di UNY. Hal ini agar mahasiswa bidikmisi dapat mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam masa studinya. Seperti mengenai masalah pencairan dana bidikmisi yang dinilai sering kali mengalami keterlambatan. Sebagai penyelenggara program bidikmisi tentunya masalah keterlambatan pencairan dana bidikmisi turut mendapat perhatian khusus. Alternatif kebijakapun diberikan agar dapat membantu mengatasi masalah keterlambatan pencairan dana. Sebagaimana yang dimuat dalam kutipan wawancara berikut :

“Jadi begini mas, pihak kampus menyadari akan keresahan mahasiswa bidikmisi mengenai keterlambatan uang bulanan yang diberikan pemerintah sebagai wujud dukungan pada aktivitas akademik. Untuk itu Universitas membantu memberikan dana talangan terlebih dahulu apabila dana telat cair mas”. (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Lebih lanjut narasumber menyampaikan bahwa,

Bantuan dana akan diberikan secara selektif, jadi kalau dana telat tidak langsung diberikan tapi usaha biar mahasiswa bisa menghargai sebuah usaha. Akan tetapi, uang saku bagi mahasiswa bidikmisi yang juga menjabat sebagai aktivis dikampus dan aktif pada kegiatan UKM. Hal ini dilakukan agar memacu mahasiswa bidikmisi lainnya untuk lebih mandiri dan bertanggungjawab pada kewajibannya sebagai mahasiswa bidikmisi. Apabila benar-benar sangat membutuhkan, mahasiswa berhak mengajukan permohonan bantuan dana.” (wawancara Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

3. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Program Bidikmisi

Penyelenggaraan program bidikmisi tidak selalu berjalan mudah, selalu ada hambatan ataupun kendala pada proses pelaksanaannya. Sebab untuk mengimplementasikan sebuah program yang lahir dari suatu kebijakan harus memperhatikan segala aspek yang ada. Untuk mewujudkan keberhasilan program dibutuhkan keyakinan dan komitmen dari setiap pihak baik penyelenggara program maupun sasaran program. Adapun hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan program bidikmisi ialah :

- a. Komitmen dan keseriusan mahasiswa bidikmisi dalam menjalankan kewajibannya.

Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana bidikmisi merupakan kelompok mahasiswa yang berlatar belakang keluarga dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau dikategorikan miskin. Ketika mendapatkan bantuan dan penyelenggaraan pendidikan bidikmisi setiap mahasiswa harus memenuhi ketentuan dan aturan

dari program bidikmisi. Diantaranya seperti aktif dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Memiliki indeks prestasi yang baik pada setiap semester hingga lulus tepat waktu.

Akan tetapi, tidak semua mahasiswa bidikmisi menyadari tugas dan kewajibannya. Beberapa diantaranya bahkan tergolong mahasiswa bidikmisi yang memerlukan perhatian khusus karena indeks prestasi kumulatif (IPK) yang menurun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala BAKI UNY yang termuat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“sebenarnya mas, sepanjang mahasiswa serius menjalankan kuliahnya pasti indeks prestasinya juga baik. Tetapi, memang ada beberapa mahasiswa yang mengalami kemunduran dari segi prestasi akademik, yah kembali lagi kepada niat dan keseriusan mahasiswa tersebut mas.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Selain itu ketidakmampuan mahasiswa bidikmisi dalam mengemban tanggungjawabnya tercermin pula pada beberapa mahasiswa bidikmisi yang terpengaruh gaya hidup hedonis mahasiswa lainnya yang bukan penerima bidikmisi. Dana yang diberikann oleh bidikmisi dialokasikan terlebih dahulu untuk kepentingan sekunder. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Dekan I FIP dalam kutipan wawancara narasumber sebagai berikut:

“saya pernah mendapati mahasiswi bidikmisi yang dandan ke kampus mas, menurut saya dandanannya tidak seperti cerminan mahasiswa bidikmisi dan benar saja setelah ditelusuri dana

pengembangan pendidikan yang diberikan bidikmisi dialokasikan terlebih dahulu untuk kepentingan sekunder. Selain itu ada juga mahasiswa bidikmisi yang perokok aktif, menurut saya kalau orang yang sudah bisa membeli rokok artinya orang tersebut sudah mampu secara ekonomi.” (wawancara Wakil Dekan I FIP UNY pada tanggal 26 Juli 2016)

Tentunya hal ini sangat disayangkan. Tantangan terbesar lainnya yaitu keseriusan mahasiswa bidikmisi untuk menyelesaikan masa studinya. Beberapa mahasiswa bidikmisi bahkan ada yang melewati ketentuan maksimum masa studi. Seperti yang diungkapkan narasumber dalam kutipan wawancara berikut :

“...memang benar mas, ada beberapa mahasiswa bidikmisi yang belum menyelesaikan masa studinya tepat waktu hal ini dikarenakan faktor internal dari mahasiswa tersebut. Mungkin kurang serius atau menganggap karena bidikmisi sudah pasti dibantu jadi menggang gampang dan mungkin juga karena tergabung dalam organisasi kemahasiswaan sehingga terlena mengerjakan tugas akhir, tapi jumlahnya sangat sedikit mas.” (wawancara Kepada Ibu Terry Irenwaty, M.Hum pada tanggal 9 Juni 2016)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh ungkapan narasumber yang dimuat dalam kutipan wawancara berikut :

“bagi mereka yang tidak punya komitmen itu menjadi kendala besar buat mereka untuk menyelesaikan masa studinya.” (wawancara Wakil Dekan I FIP UNY pada tanggal 26 Juli 2016)

Komitmen serta keseriusan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibutuhkan agar tujuan program bidikmisi dapat tercapai. Untuk itu memang diperlukan adanya

koordinasi antar semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya program bidikmisi.

- b. Kurangnya koordinasi antara pengelola bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi serta sasaran program.

Koordinasi yang baik antara setiap pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan program bidikmisi tentunya akan mempermudah pengimplementasian program. Namun dalam hal ini terlihat adanya koordinasi yang buruk antar pihak yang berwenang dan yang berkepentingan. Hal ini memungkinkan timbulnya indikasi kecurangan seperti pemalsuan data pelamar bidikmisi yang seharusnya diperuntukan kepada kelompok keluarga miskin, tapi memungkinkan terbukanya celah untuk memanfaatkan situasi oleh oknum tertentu. Selain itu, koordinasi yang buruk juga terjadi antara mahasiswa bidikmisi dengan tim pengelola bidikmisi. Berdasarkan laporan tim pengelola bidikmisi terdapat adanya mahasiswa yang tidak aktif kuliah/pindah prodi/ PTN sehingga setiap semester memungkinkan adanya mahasiswa bidikmisi yang dibatalkan atau digantikan. Maka diperlukan adanya pemaksimalan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol serta mengkoordinir masalah yang terjadi. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAKI UNY sebagaimana yang dirangkum dalam kutipan wawancara berikut :

“ketika ada mahasiswa bidikmisi yang pindah karena kerja atau sekolah kedinasan. Kalau enggak jujur uang mengalir terus ke mahasiswa tersebut padahal statusnya bukan mahasiswa bidikmisi UNY lagi. Sehingga harus evaluasi akademik sesering mungkin. Karena rata-rata yang jujur sedikit ini yang menjadi kendala administrasi juga.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Masalah internal yang terjadi pada pengelola bidikmisi UNY juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan program bidikmisi. Seharusnya tim pengelola bidikmisi mampu bekerjasama dengan baik untuk mensukseskan program bidikmisi agar dapat terdistribusi dengan baik kepada kelompok sasaran program. Hal ini senada dengan ungkapan Kepala BAKI UNY yang dimuat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“tidak semua pengelola persepsinya sama dan *welcome* untuk bidikmisi karena menganggap semua mahasiswa statusnya sama. Perlu banyak sosialisasi, pemahaman dan koordinasi terhadap semua pengelola.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

Selain itu, berdasarkan laporan tim pengelola bidikmisi UNY usulan penerima bidikmisi dari sekolah belum maksimal sebab ada yang layak, tetapi tidak diusulkan dan atau sebaliknya. Ini membuktikan diperlukan koordinasi yang baik dan terarah serta sosialisasi kepada sekolah ataupun dinas terkait agar hal ini tidak terulang.

Kemudian, berdasarkan catatan data hasil penelitian ditemukan kurangnya koordinasi antara tim pengelola bidikmisi di universitas dengan tim pengelola pusat. Hal ini dibenarkan dengan adanya masalah yaitu mahasiswa yang layak menerima Bidikmisi melebihi kuota yang diberikan. Kuota baru diperhitungkan untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, dari jalur Seleksi Mandiri dan tambahannya belum diperhitungkan.

c. Keterlambatan pencairan dana bidikmisi

Dalam hal ini keterlambatan pencairan dana terkhusus pada dana yang seharusnya di distribusikan kepada mahasiswa bidikmisi untuk keperluan *living cost*. Hal ini menjadi problematika yang tentunya dapat menghambat aktivitas mahasiswa bidikmisi. Sebab seluruh mahasiswa bidikmisi menggantungkan hidupnya berdasarkan biaya bulanan sebesar Rp. 600.000 yang diberikan oleh program bidikmisi. Hal ini sejalan dengan ungkapan mahasiswa DE seperti yang dikutip dalam wawancara narasumber berikut :

“...kalau ditanya kendala saya rasa pasti hampir seluruh mahasiswa bidikmisi akan mengatakan hal yang sama mas, yaitu masalah keterlambatan pencairan dana yang sering terjadi. Bagi saya dan teman-teman bidikmisi lainnya masalah ini adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari tim pengelola bidikmisi. Bagaimana kami bisa beraktivitas dengan lancar jika bantuan dana yang membantu kami untuk bertahan hidup saja sering terlambat.” (wawancara Kepada Mahasiswa DE pada tanggal 20 Juni 2016)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAKI UNY seperti yang dimuat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“...masalah keterlambatan pencairan dana itu memang benar mas, tetapi dana tersebut bukan berasal dari universitas mas melainkan pengelola pusat mas.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

- d. Program S1 Kependidikan belum dialokasikan anggarannya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Univeristas Negeri Yogyakarta merupakan institusi yang berfokus pada program studi kependidikan. Dengan harapan mencetak guru yang berkredibilitas tinggi, memiliki etos kerja yang baik, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang baik. Akan tetapi, harapan itu tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Sebab untuk program S1 Kependidikan belum dialokasikan anggarannya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fakta ini juga dibenarkan oleh pernyataan narasumber dalam kutipan wawancara berikut :

“Untuk jurusan kependidikan untuk PRG universitas sebelum disediakan oleh pemerintah mas, sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar segera ditindaklanjuti. Baik itu anggaran dananya.” (wawancara Kepada Kepala BAKI UNY pada tanggal 15 Juni 2016)

B. Pembahasan

1. Pemerataan Akses Pendidikan

Salah satu tujuan program bidikmisi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan merupakan langkah untuk memberikan kesempatan kepada

mahasiswa miskin untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Langkah ini juga menjadi wujud nyata upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mencerdaskan setiap lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan harapan menghasilkan lulusan yang kompetitif dan unggul pada bidangnya.

Berdasarkan data hasil penelitian program bidikmisi berhasil menjadi jembatan untuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik untuk dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Dengan kata lain, program bidikmisi telah mewujudkan pemerataan terhadap akses pendidikan. Hal ini senada dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Penyelenggaraan program bidikmisi di UNY telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi peserta bidikmisi diantaranya ialah sebagai sarana untuk mewujudkan impian masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan minat, bakat serta kreativitasnya. Selain itu, peluang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik juga dapat terwujud dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki melalui kapasitas pendidikan yang mumpuni. Artinya program bidikmisi memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan

demikian, manfaat dari penyelenggaraan bidikmisi di UNY sudah dirasakan oleh sasaran program. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Earl Babbe dalam Istiana Hermawati, dkk (2011:25) bahwa salah satu aspek yang mampu membuktikan kebijakan sosial dikatakan efektif adalah apabila masyarakat dapat menikmati hasil program.

2. Lulus Tepat Waktu

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui seberapa besar tanggapan atau respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan baik itu tanggapan yang positif ataupun negatif. Program bidikmisi sebagai bukti nyata produk dari kebijakan sosial yang berorientasi pada sektor pendidikan tinggi. Keberhasilan program bidikmisi juga tak terlepas dari responsivitas atau tanggapan dari pelaksana kebijakan dan sasaran program bidikmisi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksana kebijakan memberikan respon yang positif pada penyelenggaraan program bidikmisi. Hal tersebut tercermin dari strategi serta sinergi antar pelaksana kebijakan program bidikmisi di UNY dalam mensukseskan program bidikmisi. Bentuk responsivitas tersebut berupa pemberian pelatihan untuk meningkatkan keahlian mahasiswa bidikmisi dan pembinaan serta monitoring terhadap aktivitas mahasiswa bidikmisi di UNY. Sementara itu, program bidikmisi juga memberikan pengaruh yang besar kepada kelompok sasaran program yaitu mahasiswa penerima bidikmisi. Pengaruh tersebut tercermin dari komitmen mahasiswa bidikmisi yang terbangun baik. Kesadaran akan kesempatan yang

telah diberikan untuk dapat mengakses pendidikan tinggi begitu disyukuri oleh mahasiswa penerima bidikmisi. Tidak semua masyarakat dalam kategori miskin yang mampu mendapatkan bantuan dana pengembangan pendidikan bidikmisi. Diperlukan keyakinan, kesungguhan, usaha yang diberikan oleh pelamar bidikmisi. Karena yang mampu bersaing adalah mereka yang bukan hanya dalam kategori miskin namun juga unggul dari segi akademik.

Program bidikmisi di UNY berhasil memberikan motivasi yang besar kepada setiap mahasiswa penerima bidikmisi. Hal ini dibuktikan dengan terbangunnya komitmen mahasiswa akan kesadaran mengenai tanggungjawab dan tugas sebagai mahasiswa penerima bidikmisi. Dari data hasil penelitian kesadaran mahasiswa bidikmisi akan pentingnya menjaga komitmen dibuktikan dengan keseriusan menjalani masa studinya. Keseriusan tersebut membuahkan hasil berupa indeks prestasi yang baik bahkan *cumlaude* serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan masa studinya. Berdasarkan data hasil penelitian prestasi akademik mahasiswa UNY berhasil mencapai angka tertinggi diatas rata-rata nasional. Selain itu wujud responsivitas yang baik melalui terbangunnya komitmen mahasiswa bidikmisi dibuktikan juga dengan kemampuan mahasiswa bidikmisi yang berhasil menyelesaikan masa studinya dengan tepat waktu. Sekitar lebih dari 70% mahasiswa bidikmisi pada angkatan 2011 berhasil menyelesaikan kuliahnya dan tepat waktu. Keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata pencapaian tujuan program bidikmisi. Seperti yang diungkapkan oleh

Budiandi (2007:53) bahwa untuk mengukur efektivitas program variable yang perlu diperhatikan adalah tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa lulus tepat waktu merupakan tujuan program bidikmisi yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasil yang telah dicapai UNY dalam penyelenggaraan program bidikmisi membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa bidikmisi berhasil menyelesaikan masa studinya tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas, peran UNY dalam menyelenggarakan program bidikmisi dinilai telah mampu mewujudkan keberhasilan program bidikmisi. Hal ini sesuai dengan fakta prestasi akademik mahasiswa bidikmisi UNY diatas rata-rata nasional dan rasio antara jumlah mahasiswa bidikmisi yang berhasil lulus tepat waktu dan yang tidak tepat berbeda jauh.

3. Meningkatkan Prestasi & Semangat Berkompentisi

Bidikmisi sebagai sebuah program sosial yang lahir dari kebijakan publik terkonsentrasi pada sektor pendidikan. Dimana terdapat sejumlah sumber daya manusia yang berpotensi dalam segi akademik namun memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengakses pendidikan. Program bidikmisi berfokus pada pemberian bantuan dana pendidikan pada jenjang strata 1. Untuk mencapai tujuan program bidikmisi maka diperlukan adanya koordinasi antara pengelola, penyelenggara, dan sasaran program.

Perguruan Tinggi dalam hal ini berfungsi sebagai penyelenggara program bidikmisi. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan komitmen penyelenggara untuk meningkatkan kualitas dari sasaran program yaitu penerima bidikmisi sehingga tujuan program dapat tercapai. Keseriusan dan komitmen itu tercermin pada penyelenggaraan program bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak tahun 2010 UNY turut serta berperan aktif dalam menyelenggarakan program bidikmisi. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan UNY dalam meningkatkan kualitas individu penerima bidikmisi. UNY memberikan dukungan penuh untuk pengembangan minat dan bakat serta kreativitas mahasiswa bidikmisi. Faktanya dukungan tersebut berhasil membawa UNY pada perolehan IPK diatas rata-rata nasional untuk program bidikmisi. Pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya yang dimiliki akan membawa program pada tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai penyelenggara program bidikmisi UNY telah berhasil membardayakan sumber daya mahasiswa bidikmisi.

Prestasi akademik yang gemilang menjadi wujud nyata keberhasilan penyelenggaraan program bidikmisi di UNY. Sebagian besar mahasiswa bidikmisi UNY juga menorehkan prestasinya pada bidang akademik maupun non akademik. Selain itu mahasiswa bidikmisi juga turut aktif ikut serta dalam berkompetisi baik pada level fakultas, universitas, maupun pada tingkat nasional. Tentunya hal ini sejalan dengan salah satu tujuan diselenggarakannya program bidikmisi yaitu meningkatkan prestasi dan

semangat berkompetisi. Meskipun terdapat beberapa mahasiswa penerima bidikmisi yang mengalami kemunduran pada prestasi akademiknya. Namun, rasionya berbeda jauh dengan mahasiswa penerima bidikmisi yang berhasil memperoleh indeks prestasi yang gemilang. Untuk mengatasi permasalahan ini UNY melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program bidikmisi terlaksana dan bagaimana responsivitas dari sasaran program serta mengatasi hambatan yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang optimum terhadap mahasiswa bidikmisi akan meningkatkan kualitas mahasiswa bidikmisi. Hal tersebut tercermin dari peningkatan prestasi akademik mahasiswa bidikmisi, keikutsertaan mahasiswa bidikmisi dalam berbagai kompetisi. Selain itu responsivitas yang baik ditunjukkan oleh pengelola dan penyelenggara bidikmisi di UNY melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program bidikmisi. Dengan demikian hal ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan program bidikmisi. Sejalan dengan ungkapan James L. Gibson yang dikutip dalam Kurniawan (2005) yang menyebutkan bahwa salah satu ukuran ukuran efektivitas adalah kejelasan strategi pencapaian tujuan.

4. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan program bidikmisi. Setelah terwujudnya pemerataan terhadap akses pendidikan, lulus tepat waktu, peningkatan prestasi

dan semangat berkompetisi tentu hasil akhir yang diharapkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan hasil data penelitian UNY telah memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara program bidikmisi. Hal ini dibuktikan dengan pembinaan serta pelatihan terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa bidikmisi. Pada tahap ini UNY telah berhasil meningkatkan kemampuan mahasiswa bidikmisi sesuai dengan minat bakatnya, tercermin pada keberhasilan mahasiswa bidikmisi dalam meningkatkan prestasi akademik maupun non akademiknya. Selain itu sumber daya manusia yang berkualitas juga terlihat dari konsistensi mahasiswa bidikmisi dalam menjalani masa studinya. Bahkan tidak sedikit mahasiswa bidikmisi UNY yang telah melanjutkan program studi pada jenjang pendidikan S2 melalui beasiswa LPDP. Beberapa diantaranya bahkan melanjutkan program studi S2 di luar negeri dan beberapa lainnya telah bekerja pada bidang professional sesuai dengan minat bakatnya.

Keberhasilan UNY dalam mencetak mahasiswa bidikmisi yang berkualitas juga tercermin dari upaya UNY untuk menjadikan mahasiswa bidikmisi UNY memiliki pribadi yang mandiri, disiplin, serta bertanggungjawab terhadap keputusannya. Seperti dalam mengatasi masalah pencairan dana bidikmisi yang sering kali terlambat. UNY sebagai penyelenggara menghadirkan alternatif kebijakan untuk memberikan dana talangan terlebih dahulu. Namun pemberian dana talangan akan di dahulukan

bagi mahasiswa bidikmisi yang aktif dalam kegiatan organisasi di UNY atau di berikan kepada mereka yang terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan dana secara tertulis dengan proses pengajuan yang cukup *procedural*. Hal ini dimaksudkan bukan untuk mempersulit mahasiswa bidikmisi, melainkan untuk melatih mahasiswa bidikmisi untuk memiliki jiwa yang berusaha keras untuk meraih tujuan dalam hidupnya dan mewujudkan pribadi yang lebih mandiri. Seperti yang juga diungkapkan Earl Babbe dalam Istiana Hermawati, dkk (2011:25) bahwa salah satu aspek yang menunjukkan suatu kebijakan sosial dikatakan efektif adalah terwujudnya kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Ekky Lukmana Putri bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tegalpanggung dilihat dari ketercapaian tujuan program tersebut dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tercapai yaitu memandirikan masyarakat miskin pada aspek sosial dan ekonomi. Tentunya apabila dikaitkan dengan program bidikmisi yang merupakan produk dari kebijakan sosial menunjukkan bahwa sebuah program sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat memandirikan kelompok sasaran program baik secara sosial maupun ekonomi. Artinya program bidikmisi maupun program KUBE dilahirkan agar dapat meningkatkan kesadaran individu dalam meningkatkan taraf hidupnya.

C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Program Bidikmisi di UNY

1. Komitmen dan keseriusan mahasiswa bidikmisi dalam menjalankan kewajibannya.

Perbedaan pola pikir dan sudut pandang setiap peserta bidikmisi merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kualitas dari diri masing-masing peserta bidikmisi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan program bidikmisi. Sebab tidak semua peserta bidikmisi menyadari akan tanggungjawab dan tugasnya sebagai mahasiswa penerima bantuan dana pengembangan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang mengalami kemunduran pada prestasi akademiknya juga mahasiswa yang terpengaruh dengan gaya hidup hedonis sehingga dana pengembangan pendidikan dialokasikan terlebih dahulu untuk kepentingan sekunder. Selain itu pondasi komitmen dan keseriusan yang tidak kokoh dalam menjalani masa studi menjadi penghambat mahasiswa bidikmisi dalam menyelesaikan masa studinya dengan tepat waktu.

2. Kurangnya koordinasi antara pengelola bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi serta sasaran program.

Perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi juga terjadi pada pengelola bidikmisi. Keadaan ini mempersulit penyelenggaraan program bidikmisi di UNY. Sebab untuk mewujudkan keberhasilan program maka setiap individu yang berwenang dalam mengelola program bidikmisi di UNY

harus memiliki visi misi yang sama agar tujuan program dapat tercapai. Kurangnya koordinasi antara pengelola bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi juga menyebabkan usulan penerima bidikmisi dari sekolah asal belum maksimal. Penambahan quota peserta bidikmisi juga harus dikoordinasikan dengan tim pengelola pusat. Selain itu terdapat mahasiswa penerima bidikmisi yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu kepada pengelola bidikmisi di UNY ketika memutuskan untuk pindah kuliah atau memilih sekolah kedinasan.

3. Keterlambatan pencairan dana bidikmisi

Keterlambatan pencairan dana merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus yang lebih besar. Sebab seluruh mahasiswa bidikmisi mengeluhkan keterlambatan pencairan dana. Kepentingan untuk bertahan hidup menjadi faktor utama mengapa seluruh mahasiswa bidikmisi mengeluhkan hal ini. Biaya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bulanan seharusnya diberikan tepat waktu setiap bulan. Hal ini perlu ditelaah oleh pengelola bidikmisi pada level pusat.

4. Program S1 Kependidikan belum dialokasikan anggarannya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Fakta ini tentunya menjadi hambatan bagi mahasiswa pada program studi kependidikan. Seharusnya pemerintah dan tim pengelola pusat juga memfasilitasi dan memberikan anggaran untuk pengembangan pendidikan profesi guru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas program bidikmisi di UNY ditunjukkan dengan tercapainya tujuan program bidikmisi, yaitu:
 - a. Pemerataan Akses pendidikan

Manfaat yang telah dirasakan seluruh pihak dari terselenggaranya program bidikmisi di UNY adalah bukti keberhasilan program bidikmisi di UNY. Wujud dari keberhasilan tersebut tercermin dari pemerataan terhadap akses pendidikan tinggi. Kesempatan kepada masyarakat dengan keterbatasan finansial untuk mengembangkan minat, bakat, serta kreativitasnya pada perguruan tinggi dapat terwujud berkat terselenggaranya program bidikmisi di UNY. Dengan terselenggaranya program bidikmisi di UNY peserta bidikmisi mendapatkan peluang untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Melalui hal tersebut program bidikmisi di UNY dinyatakan efektif karena bagian dari tujuan bidikmisi yaitu pemerataan akses pendidikan telah tercapai.

b. Lulus Tepat Waktu

Pada tahap ini keberhasilan penyelenggaraan program bidikmisi di UNY dilihat dari responsivitas sasaran program yaitu mahasiswa bidikmisi. Responsivitas tersebut tercermin dari ketepatan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya. Hal ini dibuktikan dengan angka 73,20 % atau sekitar 366 Mahasiswa bidikmisi lulus tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut tujuan bidikmisi yaitu lulus tepat waktu dipandang sudah berhasil.

c. Meningkatkan Prestasi & Semangat berkompetisi

Keberhasilan program bidikmisi di UNY dapat dilihat berdasarkan kemampuan penyelenggara dan pengelola bidikmisi dalam memberdayakan mahasiswa bidikmisi secara optimum. Pemberdayaan yang optimum terhadap mahasiswa bidikmisi UNY tercermin pada dukungan pihak penyelenggara dan pengelola bidikmisi terhadap minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa bidikmisi. Sehingga hasil yang di dapat dibuktikan dengan keunggulan prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa bidikmisi di UNY serta keikutsertaan mahasiswa bidikmisi dalam berbagai kompetisi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya . Melalui hal tersebut tujuan bidikmisi untuk meningkatkan prestasi dan mendorong mahasiswa bidikmisi untuk semangat berkompetisi dipandang sudah efektif karena salah tujuan dari program bidikmisi yaitu meningkatkan prestasi dan

semangat berkompetisi sudah tercapai. Seperti yang tercermin pada hasil indeks prestasi akademik mahasiswa bidikmisi yang menunjukkan angka 50,45% untuk mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 dan 47,55% dengan IPK 3,01 – 3,5. Hal ini membuktikan bahwa tujuan program bidikmisi untuk meningkatkan prestasi dan semangat berkompetisi telah tercapai.

d. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Komitmen UNY untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program bidikmisi di UNY tercermin dari upaya penyelenggara dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembinaan, pelatihan terhadap minat dan bakat, serta upaya untuk menumbuhkan jiwa kemandirian mahasiswa bidikmisi. Selain itu keberhasilan mahasiswa bidikmisi untuk melanjutkan program studi S2 melalui beasiswa LPDP dan bekerja pada bidang profesional sesuai keilmuannya merupakan wujud nyata bahwa tujuan dari bidikmisi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas telah tercapai.

2. Faktor penghambat penyelenggaraan program bidikmisi di UNY

Faktor penghambat yang muncul dilapangan terhadap terselenggaranya program bidikmisi di UNY adalah tidak semua mahasiswa bidikmisi di UNY memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan kewajibannya, kurangnya koordinasi antara pengelola

bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi serta sasaran program, keterlamabatan pencairan dana bidikmisi, program S1 Kependidikan belum dialokasikan anggarannya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga menjadikan hambatan dalam pengoptimalan program bidikmisi di UNY.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa terselenggaranya program bidikmisi memberikan kesempatan untuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dapat mengakses pendidikan tinggi. Kebijakan pemerintah untuk menghadirkan program bidikmisi menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah untuk mencerdaskan dan mensejahterahkan bangsa dengan mendistribusikan pendidikan yang adil dan merata kepada setiap lapisan masyarakat. Sehingga keberadaan program bidikmisi perlu untuk dipertahankan.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi antar pengelola bidikmisi di UNY agar penyelenggaraan bidikmisi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi misi serta tujuan program bidikmisi.
2. Perlu koordinasi dan informasi secara intensif antara PTN, Bank, dan Pengelola Pusat.

3. Pemberian konseling secara lebih personal dengan mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus untuk dapat mengatasi masalah internal yang terjadi pada mahasiswa bidikmisi.
4. Sosialisasi dan koordinasi ke Sekolah/Dinas agar ditingkatkan. Sehingga sekolah dapat memaksimalkan pelamar bidikmisi.
5. Mengusulkan kuota penambahan penerima bidikmisi kepada tim pengelola pusat agar kesempatan untuk penerima bidikmisi yang layak terbuka lebar.
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi keaktifan akademik/nonakademik juga berkoordinasi dengan PT lain.
7. Koordinasi dan verifikasi data rekening dan nama mahasiswa dengan Bank dan Petugas IT Pusat serta pemberian pinjaman biaya hidup, jika pencairnya lama/gagal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. PT Buku Kita. Jakarta.
- Damar A. Hartaji (2012). *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. (tidak diterbitkan).
- Deddy Mulyana. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2002. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dwi Siswoyo dkk. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Haris Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Istiana Hermawati, dkk. (2011). *Evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Kurniawan Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima, Jakarta, GhaliaIndonesia.

- Ni Wayan. Budiani. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Vol.2(1): 49-57
- Soetomo. (2010). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2005). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Suwitri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Riant Nugroho. (2008). *Public Policy*. Jakarta : Alexmedia Komputindo.
- Robert K. Yin. (2008). *Studi Kasus (Desain Dan Metode), (Case Study Research Design and Methods”)* diterjemahkan oleh Drs. M. Djauzi Mudzakir, MA, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- William N. Dunn. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajahmada

B. Skripsi

- Ekky Lukmana Putri. (2014). “Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Bersama (KUBE) (Penelitian deskriptif di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta)”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Angga Sanjaya. (2015). “Efektivitas Pelaksanaan Program Revitalisasi Lada Putih (Penelitian deskriptif di Provinsi Bangka Belitung)”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Website

Dwi Murdaningsih. (2015). *329 Mahasiswa Bidik Misi Gagal Lulus Tepat Waktu*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/15/08/06/nsndyv368-329-mahasiswa-bidik-misi-gagal-lulus-tepat-waktu> pada tanggal 26 Januari 2016 Jam 19.45 WIB

Anonim. (2016). *Apakah Bidikmisi Itu? Kenapa bukan disebut Beasiswa?*. Diakses dari <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/view?q=apakah-bidikmisi-itu-kenapa-bukan-disebut-beasiswa-&id=3> pada tanggal 26 Januari 2016 Jam 19.30 WIB.

_____. (2014). *Beasiswa Bidikmisi tak Lepas dari Masalah*. Diakses dari http://www.kompasiana.com/azmy_fm/beasiswa-bidikmisi-tak-lepas-dari-masalah_54f39d877455137d2b6c7b43 pada tanggal 29 Januari 2016: 21.15 WIB

_____. (2015). *Menyoal Kuota Bidikmisi Unsoed*. Diakses dari <http://beritaunsoed.com/berita/menyoal-kuota-bidikmisi-unsoed-2015/> pada 29 januari 2016: 20.40 WIB

D. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA 1

Subyek Penelitian : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Informan Penelitian : Sukirjo, M.Pd, Kepala BAKI UNY

Tempat Penelitian : Kantor Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi
(BAKI) UNY

1. Apakah sasaran program Bidikmisi sudah tepat ?
2. Bagaimana tahap proses penyeleksian penerima Bidikmisi?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program Bidikmisi di UNY? apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana ?
4. Siapa saja aktor atau pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program Bidikmisi di UNY?
5. Adakah kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bidikmisi?
6. Sejauh mana efektivitas program Bidikmisi? Apakah 5 Tujuan Bidikmisi sudah tercapai, yaitu :
 - a. Pemertaan akses pendidikan
 - b. Lulus tepat waktu
 - c. Meningkatkan prestasi
 - d. Semangat berkompetisi
 - e. SDM berkualitas
7. Apakah bantuan dana pendidikan bidikmisi selalu tepat waktu diberikan kepada peserta Bidikmisi?

8. Bagaimana sanksi untuk mahasiswa bidikmisi yang tidak menjalankan kewajibannya ?
9. Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap mahasiswa Bidikmisi?
10. Manfaat apa yang dirasakan dengan diselenggarakannya program bidikmisi ?

PEDOMAN WAWANCARA 2

Subyek Penelitian : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Informan Penelitian : Suwarjo, M.Si, Wakil Dekan 1 FIP UNY

Tempat Penelitian : Kantor WD 1 FIP UNY

1. Apakah sasaran program Bidikmisi sudah tepat ?
2. Bagaimana tahap proses penyeleksian penerima Bidikmisi?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program Bidikmisi di UNY? apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana ?
4. Siapa saja aktor atau pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program Bidikmisi di UNY?
5. Adakah kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bidikmisi?
6. Sejauh mana efektivitas program Bidikmisi? Apakah 5 Tujuan Bidikmisi sudah tercapai, yaitu :
 - a. Pemertaan akses pendidikan
 - b. Lulus tepat waktu
 - c. Meningkatkan prestasi
 - d. Semangat berkompetisi
 - e. SDM berkualitas
7. Apakah bantuan dana pendidikan bidikmisi selalu tepat waktu diberikan kepada peserta Bidikmisi?
8. Bagaimana sanksi untuk mahasiswa bidikmisi yang tidak menjalankan kewajibannya ?
9. Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap mahasiswa Bidikmisi?
10. Manfaat apa yang dirasakan dengan diselenggarakannya program bidikmisi ?

PEDOMAN WAWANCARA 3

Subyek Penelitian : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Informan Penelitian : Terry Irenwaty, M.Hum Dosen Ilmu Sejarah UNY

Tempat Penelitian : Kantor Jurusan Ilmu Sejarah UNY

1. Apakah sasaran program Bidikmisi sudah tepat ?
2. Bagaimana tahap proses penyeleksian penerima Bidikmisi?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program Bidikmisi di UNY? apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana ?
4. Siapa saja aktor atau pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program Bidikmisi di UNY?
5. Adakah kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bidikmisi?
6. Sejauh mana efektivitas program Bidikmisi? Apakah 5 Tujuan Bidikmisi sudah tercapai, yaitu :
 - a. Pemertaan akses pendidikan
 - b. Lulus tepat waktu
 - c. Meningkatkan prestasi
 - d. Semangat berkompetisi
 - e. SDM berkualitas
7. Apakah bantuan dana pendidikan bidikmisi selalu tepat waktu diberikan kepada peserta Bidikmisi?
8. Bagaimana sanksi untuk mahasiswa bidikmisi yang tidak menjalankan kewajibannya ?
9. Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap mahasiswa Bidikmisi?
10. Manfaat apa yang dirasakan dengan diselenggarakannya program bidikmisi ?

PEDOMAN WAWANCARA 4

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : MO, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 5

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : WI, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 6

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : SI, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 7

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : BI, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 8

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : SE, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 10

Subyek Penelitian : Sasaran Program Bidikmisi

Informan Penelitian : UR, Mahasiswa Penerima Bidikmisi UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Apakah dana yang diberikan selalu tepat waktu?
3. Dana yang diberikan oleh bidikmisi dialokasikan kemana terlebih dahulu?
4. Adakah kendala yang dirasakan dari program bidikmisi?
5. Apakah program bidikmisi memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meningkatkan prestasi? Jelaskan alasannya.
6. Apakah IP saudara/i menurun atau meningkat?
7. Apakah pengawasan dan monev dari kampus berjalan baik? Berikan penjelasan.
8. Adakah menurut saudara/i peserta bidikmisi yang tidak tepat sasaran?
9. Manfaat apa yang dirasakan dari program bidikmisi?
10. Kritik dan saran untuk bidikmisi.

PEDOMAN WAWANCARA 11

Subyek Penelitian : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

Informan Penelitian : DE, Mahasiswa UNY

Tempat Penelitian : UNY

1. Bagaimana pelaksanaan program bidikmisi selama ini? Apakah benar-benar telah membantu mahasiswa dalam masa studinya?
2. Adakah menurut anda mahasiswa bidikmisi yang tidak tepat sasaran ?
3. Bagaimana anda melihat gaya hidup mahasiswa bidikmisi ? apakah mencerminkan mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi ?
4. Adakah mahasiswa bidikmisi yang anda ketahui mengalami kemunduran dalam prestasi akademik ?
5. Apakah menurut anda bidikmisi program yang patut untuk dipertahankan ?

Pedoman Observasi

- a. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi UNY;
- b. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi Subbag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa;
- c. Aktivitas kegiatan, situasi, dan kondisi di Subbag Sarana Pendidikan & Subbag Akademik; dan
- d. Tindakan informan dalam wawancara di Kantor Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi UNY, Kantor WD 1 FIP UNY, Ruang Dosen Ilmu Sejarah FIS UNY, serta di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Dokumen Hasil Peneltian

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
TAHUN 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di 104 perguruan tinggi negeri. Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009.

Perguruan tinggi penyelenggara program Bidikmisi adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pada tahun 2011 mahasiswa baru penerima Bidikmisi bertambah sebanyak 30.000 di 117 perguruan tinggi negeri dan pada tahun 2012 bertambah lagi sebanyak 42.000 mahasiswa termasuk 2.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 61.000 mahasiswa termasuk 8.000 untuk perguruan tinggi swasta, dan tahun 2014 sebanyak 63.070 mahasiswa (58.000 untuk PTN dan 5070 untuk PTS).

Pada tahun 2015 akan dilanjutkan dengan menerima 60.000 calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang diselenggarakan di 120 perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang akan diseleksi melalui Kopertis dibawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Buku pedoman Bidikmisi Tahun 2015 ini merupakan revisi dari buku pedoman Bidikmisi 2014 yang memuat hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan.

Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola perguruan tinggi dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu pada pedoman ini. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat membantu calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program Bidikmisi.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman Bidikmisi 2015 ini.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
BAB II ORGANISASI PELAKSANA	4
A. Penyelenggara	4
B. Pengelola Pusat	4
C. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis	5
BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA	7
A. Persyaratan Calon Penerima	7
B. Kuota Mahasiswa Baru	7
BAB IV PENDANAAN	9
A. Jangka Waktu Pemberian	9
B. Komponen Pembiayaan	9
C. Penyaluran Dana	10
D. Penghentian Bantuan	11
E. Pelanggaran dan Sanksi	12
BAB V MEKANISME SELEKSI	13
A. Sosialisasi dan Koordinasi	13
B. Pendaftaran Daring (<i>On-line</i>)	14
C. Pendaftaran Semi Daring	15
D. Pendaftaran Langsung (<i>Off-line</i>)	16
E. Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi	17
F. Pencalonan dan Penetapan	19
G. Hal Khusus	20
BAB VI MONITORING DAN PENGAWASAN	21

A. Monitoring oleh Tim Pengelola Pusat	21
B. Monitoring oleh Tim Pengelola Perguruan Tinggi	22
BAB VII PELAPORAN	23
A. Tim Pengelola Pusat	23
B. Tim Pengelola Perguruan Tinggi	23
PENGADUAN MASYARAKAT	24
LAMPIRAN	0
LAMPIRAN I. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BIDIKMISI	0
LAMPIRAN II. FORMULIR ISIAN	0
1. FORMULIR REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH / MADRASAH	1
2. PRESTASI SEKOLAH 3 TAHUN TERAKHIR	2
3. HASIL UJIAN NASIONAL SEKOLAH	3
4. DAFTAR SISWA YANG DIREKOMENDASIKAN	4
5. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN	5
6. LAMPIRAN SURAT	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29,4% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

B. Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2014 dan 2015 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA

A. Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

B. Pengelola Pusat

1. Pengarah
 - a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ketua);
 - b. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan
2. Penanggung Jawab Program
 - a. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Koordinator);
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Tim Pelaksana
 - a. Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ;
 - b. Pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - c. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
 - d. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Satuan Kerja Direktorat Kemahasiswaan;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat
 - a. Menyusun rancangan program dan atau Pedoman Penyelenggaraan;
 - b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi;
 - c. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran on-line;
 - d. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
 - e. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi;
 - f. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;
 - g. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana/TIK PT;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. Memberikan pelayanan pengaduan;
 - j. Memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan.

C. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis

1. Penanggungjawab
 - a. Pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi;
 - b. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV.
2. Pelaksana
 - a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I – XIV
 - c. Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang ditunjuk;
 - d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi;
 - e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.
3. Tugas dan Tanggung Jawab
 - Perguruan Tinggi
 - a. Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayahnya;
 - b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
 - c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi
 - d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
 - e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
 - f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
 - g. Monitoring dan evaluasi internal;
 - h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.
 - Kopertis:
 - a. Mendistribusikan kuota Bidikmisi untuk mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di wilayahnya;
 - b. Melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi di wilayahnya;
 - c. Melakukan verifikasi calon mahasiswa penerima Bidikmisi PTS di wilayahnya;
 - d. Menetapkan dengan Surat Keputusan penerima Bidikmisi;
 - e. Menyalurkan dana *resettlement* pada mahasiswa yang berhak;
 - f. Monitoring dan Evaluasi;
 - g. Merekomendasikan penggantian penerima Bidikmisi;
 - h. Membantu PTS melaporkan IPK melalui sistem daring;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan Bidikmisi dan dana *resettlement*.

BAB III

PERSYARATAN DAN KUOTA

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2015;
2. Lulusan tahun 2014 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
 - b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
 - c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
 - d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
 - 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - 3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN
 - b. PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS.

B. Kuota Mahasiswa Baru

1. Kuota Bidikmisi didistribusikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. SNMPTN dan seleksi mandiri (PTN non SNMPTN, Politeknik dan PTS);
 - b. SBMPTN;
 - c. Seleksi mandiri PTN.
2. Kuota Kopertis ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Ditjen Belmawa bersama Kopertis dengan pertimbangan: (1) jumlah program studi yang memenuhi syarat akreditasi; (2) jumlah perguruan tinggi yang memenuhi syarat; (3) tingkat kemiskinan wilayah

3. Kuota PTS melalui seleksi mandiri ditetapkan oleh Kopertis berdasarkan: (1) jumlah program studi yang memenuhi persyaratan akreditasi, dengan proporsi maksimal 20% dari total mahasiswa baru; (2) Kondisi geografis, karakteristik sosial ekonomi sekitar perguruan tinggi negeri untuk kekhususan wilayah 3T; (3) ketaatan perguruan tinggi terhadap azas pengelolaan yang baik;
4. Kuota untuk PTS termasuk penentuan program studi dilakukan oleh Ditjen Belmawa bersama Kopertis Wilayah dengan kriteria khusus.

BAB IV

PENDANAAN

A. Jangka Waktu Pemberian

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, 6 (enam) semester untuk program Diploma III, serta Akademi Komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II, dan 2 (dua) semester untuk program Diploma I.
2. Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
 - a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - b. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - c. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - d. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - e. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
3. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.
4. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan biaya pendidikan yang bersumber dari dana lain yang sah.

B. Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
 - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi;
 - b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi;
 - c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan:

- a. Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan melalui SK Rektor/Direktur/Ketua;
 - b. Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama.
 - c. Perguruan Tinggi dapat mengubah besaran bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa dengan cara mengurangi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
4. Biaya Kedatangan
- Biaya kedatangan atau *resettlement* di alokasikan sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
- a. Penggantian biaya transport mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan).
 - b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan.
 - c. Biaya pengelolaan (seleksi kelayakan dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis).
 - d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll.
5. Hal khusus
- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
 - b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
 - c. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya
 - 1) Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus.
 - 2) Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan perguruan tinggi.
 - 3) Hal hal lainnya yang relevan.

C. Penyaluran Dana

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap pada bulan Maret-Agustus dan periode semester gasal pada bulan September-Februari sesuai dengan kalender akademik;
2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester gasal;
3. Biaya kedatangan (*resettlement*) diberikan setelah ada penetapan penerima Bidikmisi berdasarkan kebutuhan dan diberikan melalui mekanisme kontraktual;.

4. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi, ke:
 - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan; dan
 - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

D. Penghentian Bantuan

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti
2. Drop Out
3. Non Aktif
4. Diberhentikan sementara apabila tidak digantikan

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana/Diploma IV yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester dan mahasiswa Program Diploma III yang lulus kurang dari 6 (enam) semester), maka bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan. Penggantian penerima ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Belmawa dan melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>.

E. Pelanggaran dan Sanksi

Perguruan tinggi dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi yang tertera dalam peraturan pendaftaran mahasiswa baru dan panduan akademik.



**LAPORAN KEMAJUAN STUDI
MAHASISWA BIDIKMISI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERIODE SAMPAI DENGAN SEMESTER GASAL 2015/2016

**Laporan ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan studi
mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi UNY**

**Disusun oleh :
Tim Pengelola Bidikmisi UNY**

**BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MARET 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Yogyakarta Periode sampai dengan Semester Gasal 2015/2016. Laporan ini kami susun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami sebagai Pengelola Program.

Program ini dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2010 melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdiknas RI (sekarang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi), yaitu Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Program tersebut merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi tertentu sampai lulus tepat waktu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan Penyelenggaraan Program ini sangat tergantung dari partisipasi aktif dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Wakil Rektor I, II, III, dan IV beserta Staf/Jajarannya;
5. Para Dekan dan Seluruh Pimpinan di Seluruh Fakultas;
6. Segenap Pimpinan dan Staf Pengelola Program baik tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi di Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Semoga amal baik Bapak/Ibu/Sdr, semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program ini selalu mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, dengan memohon ridho-Nya, kami berharap laporan ini bermanfaat bagi kemajuan penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi UNY pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, Maret 2016
Ka. Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Informasi UNY,

Sukirjo, M.Pd.
NIP 196707051993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Program	2
C. Misi Program Bidikmisi	3
D. Tujuan	3
E. Sasaran.....	4
BAB II PERKEMBANGAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA BIDIKMISI.....	5
A. Kemajuan Hasil Studi Angkatan 2012,2013,2014, dan 2015	5
1. Angkatan 2012	5
a. Statistik Hasil Studi (IPK & SKS)	5
b. Sebaran Capaian IPK.....	6
c. Perkembangan Nilai Kemampuan Bahasa Inggris (ProTEFL)	6
d. Lulusan	8
e. Rekomendasi Mahasiswa Perlu Perhatian Khusus	9
2. Angkatan 2013	13
a. Statistik Hasil Studi (IPK & SKS)	13
b. Sebaran Capaian IPK.....	14
c. Perkembangan Nilai Kemampuan Bahasa Inggris (ProTEFL)	14
d. Rekomendasi Mahasiswa Perlu Perhatian Khusus	15
3. Angkatan 2014	19
a. Statistik Hasil Studi (IPK & SKS)	19
b. Sebaran Capaian IPK.....	20
c. Perkembangan Nilai Kemampuan Bahasa Inggris (ProTEFL)	20
d. Rekomendasi Mahasiswa Perlu Perhatian Khusus	21
4. Angkatan 2015	23
a. Statistik Hasil Studi (IPK & SKS)	23

b.	Sebaran Capaian IPK.....	25
c.	Perkembangan Nilai Kemampuan Bahasa Inggris (ProTEFL)	25
d.	Rekomendasi Mahasiswa Perlu Perhatian Khusus	26
B.	Monitoring Lulusan Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010 dan 2011.....	28
1.	Angkatan 2010	28
a.	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi	28
b.	Profil Lulusan	29
c.	Rekapitulasi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010	30
d.	Daftar Mahasiswa Bidikmisi Belum Lulus Angkatan 2010.....	32
2.	Angkatan 2011	35
a.	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi	35
b.	Profil Lulusan	36
c.	Rekapitulasi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011	38
d.	Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011 dengan Status Belum Lulus Hingga Maret 2016	40
e.	Mahasiswa Perlu Perhatian Khusus.....	44
C.	Evaluasi Status Kelompok Bidikmisi	46
D.	Pengembangan Potensi/ Prestasi Mahasiswa	48
BAB III	PEMBINAAN DAN MONITORING PROGRAM	49
A.	Pembinaan Akademik.....	49
B.	Pembinaan Kemahasiswaan	49
C.	Monitoring dan Pengawasan Program	50
D.	Pelaporan Penyelenggaraan Program.....	50
BAB IV	PENUTUP	51
A.	Permasalahan dan Hambatan.....	51
B.	Saran dan Rekomendasi	53
LAMPIRAN		54

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Grafik 1.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011 -2015 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	54
2.	Grafik 1.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011 -2015 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	54
3.	Grafik 2.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	55
4.	Grafik 2.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2011 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	55
5.	Grafik 2.3	Jumlah Lulusan Bidikmisi Angkatan 2011 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	56
6.	Grafik 2.4	IPK Lulusan Bidikmisi Angkatan 2011 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	56
7.	Grafik 2.5	Masa Studi Lulusan Bidikmisi Angkatan 2011 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	57
8.	Grafik 3.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2012 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	58
9.	Grafik 3.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2012 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	58
10.	Grafik 4.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2013 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	59
11.	Garfik 4.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2013 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	59
12.	Garfik 5.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2014 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	60
13.	Grafik 5.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2014 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	60
14.	Grafik 6.1	Statistik IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2015 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	61
15.	Grafik 6.2	Sebaran IPK Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2015 Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016	61
16.	Grafik Perkembangan Kelulusan Mahasiswa Bidikmisi		62
17.	Daftar Rangkuman Per Fakultas Mahasiswa Bidikmisi Perlu Perhatian Khusus		74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belum meratanya kesempatan/akses pendidikan merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29,4% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Hal itu menunjukkan masih banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sarannya dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Oleh karena itu, sangat tepat kebijakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 menetapkan adanya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi tertentu sampai lulus tepat waktu.

Dalam rangka mendukung program tersebut, perlu dilakukan pengelolaan yang sebaik-baiknya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi termasuk pelaporannya. Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus dikelola secara tepat: tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. Landasan Program

Peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang

menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

5. Buku Pedoman Bidikmisi Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

C. Misi Program Bidikmisi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Tujuan

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Sasaran

Sasaran evaluasi adalah mahasiswa yang ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan Biaya Pendidikan (Bidikmisi) yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang ditetapkan dan aktif sebagai peserta Program Bantuan Biaya Pendidikan (Bidikmisi) di UNY untuk empat tahun angkatan yang sudah berjalan (2012, 2013, 2014, dan 2015). Kelompok kedua adalah mahasiswa yang pernah ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan Biaya Pendidikan (Bidikmisi) di UNY yaitu angkatan 2010 dan 2011.

b. Profil Lulusan

Tabel 2.28 Profil Lulusan Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010

No.	Fakultas	Jumlah Lulusan	IPK Terendah	Rerata IPK	IPK Tertinggi	Masa Studi Tercepat			Rerata Masa Studi	
						Tahun	Bulan	Hari	Tahun	Bulan
1	FIP	53	3.24	3.55	3.84	3	6	0	4	1
2	FBS	52	3.13	3.51	3.86	3	6	28	3	7
3	FMIPA	59	2.81	3.48	3.84	3	5	0	3	11
4	FIS	39	3.23	3.56	3.79	3	4	0	3	11
5	FT	70	2.89	3.39	3.85	2	8	0	3	10
6	FIK	26	3.32	3.49	3.7	3	6	28	3	11
7	FE	39	3.15	3.56	3.85	2	8	30	4	1
	UNY	338	2.81	3.50	3.86					

Dari 338 lulusan mahasiswa bidikmisi angkatan 2010, tercatat IPK tertinggi yang berhasil diperoleh adalah 3.86 (RESTI SURYATI/PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1), dan masa studi tercepat untuk jenjang D3 adalah ALFIN KAESAR/TEKNIK SIPIL - D-III (Lulus pada 30-APR-13) sedangkan untuk jenjang S1 DEBY FEBRIYAN EPRILIANTO/ ADMINISTRASI NEGARA - S1 (Lulus pada 31-DES-13). Berikut adalah daftar nama lulusan mahasiswa bidikmisi angkatan 2011 dengan IPK tertinggi dan masa studi tercepat per fakultas :

Tabel 2.29 Daftar Nama Lulusan Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2010 dengan Peraih IPK Tertinggi dan Masa Studi Tercepat

No.	Fakultas	IPK Tertinggi (Lulusan)	Lulusan Tercepat
1	FIP	SELLA MAWARNI/ TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 (IPK 3.84)	MOH KHOERUL ANWAR/BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 (Lulus pada 28-FEB-14)
2	FBS	RESTI SURYATI/PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1 (IPK 3.86)	FARIHATUN/PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1(Lulus pada 28-MAR-14)
3	FMIPA	NANANG HERMAWAN/ MATEMATIKA - S1 (IPK 3.84)	GINANJAR WINAR PUTRA/PENDIDIKAN FISIKA - S1 (Lulus pada 30-JAN-14)
4	FIS	KUSWATI/PENDIDIKAN GEOGRAFI - S1 (IPK 3.79)	DEBY FEBRIYAN EPRILIANTO/ADMINISTRASI NEGARA - S1 (Lulus pada 31-DES-13)
5	FT	ASTI WULANDARI/PENDIDIKAN TEKNIK BOGA - S1 (IPK 3.85)	ALFIN KAESAR/TEKNIK SIPIL - D-III (Lulus pada 30-APR-13), ELVIANA/PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN - S1 (Lulus pada 27-MAR-14)
6	FIK	SEPTA TRIYANTA/PGSD PENDIDIKAN JASMANI - S1 (IPK 3.70), WIWIK INDRA SURANTI/PGSD PENDIDIKAN JASMANI - S1(IPK 3.70)	ANA PRASETYA/PGSD PENDIDIKAN JASMANI - S1 (Lulus pada 28-MAR-14)
7	FE	MALINDA DWI APRILIANE/ AKUNTANSI - D-III (IPK 3.85)	AMIRISA ARI SETYOWATI/AKUNTANSI - D-III (Lulus pada 30-MEI-13), DWI RONI INDRIYANTI/PENDIDIKAN AKUNTANSI - S1 (Lulus pada 30-JAN-14)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;
- e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.

6. Perguruan . . .



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 pesawat 239, 222, Fax.(0274) 552044, 541242

Laman: uny.ac.id. E-mail: akademik@uny.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 853/UN34/LT/2016

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta mengizinkan kegiatan penelitian kepada:

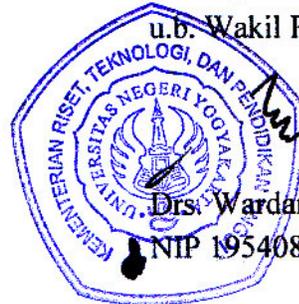
Nama : Agung Baskoro SB
NIM : 13417141080
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Universitas Negeri Yogyakarta
Waktu : Bulan April 2016 s.d. selesai
Judul : Efektivitas Program Bidikmisi di Universitas Negeri Yogyakarta

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 JUN 2016

Rektor,

u.b. Wakil Rektor I



Drs. Wardan Suyanto, M.A., Ed.D.

NIP 19540810 197803 1 001

Tembusan:

1. Dekan FIS
2. Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Kasubag. Pendidikan FIS